



## Kajian Rasio Kemandirian Daerah Kota Lhokseumawe

## Kata Pengantar

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Secara garis besar, kebijakan pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe tercermin pada komponen anggaran itu sendiri yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja daerah serta ketepatan penggunaan potensi pembiayaan daerah.

Maksud dan tujuan dilakukan analisis kajian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah pada periode anggaran 2012-2016; untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah pada periode anggaran 2012-2016; untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan rasio aktivitas pada periode anggaran 2012-2016; serta untuk mengetahui trend pertumbuhan kemandirian keuangan Kota Lhokseumawe pada periode anggaran 2012-2016.

Pada akhirnya, kami berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan pengelolaan keuangan di Kota Lhokseumawe, sehingga sumber dana pembangunan yang terbatas dapat mendatangkan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, Juni 2018  
**Plt. Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe**

**MULYANTO, S.Sos**  
Pembina Tk. I / NIP. 19630807 198708 1 001

**Daftar Isi**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	v
BAB - I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.3. Metodologi dan Sistematika Penulisan .....	I-5
BAB - II GAMBARAN UMUM DAERAH .....	II-1
2.1. Kondisi Umum Geografis Daerah .....	II-1
2.2. Kondisi Demografi .....	II-8
2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	II-10
2.4. Laju Inflasi .....	II-19
2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	II-20
2.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan .....	II-22
BAB - III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .....	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Kota Lhokseumawe .....	III-1
3.2. Pendapatan Kota Lhokseumawe .....	III-5
3.3. Belanja Kota Lhokseumawe .....	III-13
3.4. Pembiayaan Kota Lhokseumawe .....	III-16
3.5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah .....	III-18
BAB - IV ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN DAERAH .....	IV-1
4.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	IV-1
4.2. Rasio Efektivitas .....	IV-5
4.3. Rasio Aktivitas .....	IV-13
BAB - V PENUTUP .....	V-1

## Daftar Tabel

Tabel 2.1	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015 dan 2016 .....	II-9
Tabel 2.2	PDRB Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 s.d 2016 .....	II-11
Tabel 2.3	PDRB Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 s.d 2016 .....	II-13
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2016 .....	II-16
Tabel 2.5	PDRB Per Kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 s.d 2016 .....	II-17
Tabel 2.6	PDRB Per Kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 s.d 2016 .....	II-18
Tabel 2.7	Perbandingan Laju Inflasi Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Aceh dan Nasional Tahun 2012 s.d 2016 .....	II-20
Tabel 2.8	Perkembangan Komponen Penyusun IPM Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	II-22
Tabel 3.1	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-3
Tabel 3.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-6
Tabel 3.3	Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-7
Tabel 3.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-9
Tabel 3.5	Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-11
Tabel 3.6	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-13
Tabel 3.7	Persentase Realisasi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-14
Tabel 3.8	Total Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-15
Tabel 3.9	Total Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-16
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-17
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-17

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-18
Tabel 4.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah .....	IV-2
Tabel 4.2 Rasio Kemandirian Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-3
Tabel 4.3 Skala Interval Efektivitas Keuangan Daerah .....	IV-5
Tabel 4.4 Rasio Efektivitas PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-6
Tabel 4.5 Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-7
Tabel 4.6 Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-8
Tabel 4.7 Rasio Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-9
Tabel 4.8 Rasio Efektivitas Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-10
Tabel 4.9 Rasio Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-11
Tabel 4.10 Peta Efektivitas PAD Kota Lhokseumawe dan Komponennya Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-12
Tabel 4.11 Rasio Aktivitas Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-14

## Daftar Gambar

Gambar 2.1	Letak Kota Lhokseumawe .....	II-2
Gambar 2.2	Peta Kota Lhokseumawe .....	II-2
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe .....	II-3
Gambar 2.4	Peta Geologi Kota Lhokseumawe .....	II-4
Gambar 2.5	Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe .....	II-5
Gambar 2.6	Klimatologi Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .	II-5
Gambar 2.7	Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe .....	II-6
Gambar 2.8	Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe .....	II-8
Gambar 2.9	Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2012 dan 2016 .....	II-9
Gambar 2.10	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	II-10
Gambar 2.11	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	II-12
Gambar 2.12	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	II-13
Gambar 2.13	Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe dengan Migas Tahun 2016 .....	II-14
Gambar 2.14	Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe Tanpa Migas Tahun 2016 .....	II-15
Gambar 2.15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2016 .....	II-17
Gambar 2.16	PDRB Per Kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 s.d 2016 .....	II-18
Gambar 2.17	PDRB Per Kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 s.d 2016 .....	II-19
Gambar 2.18	Perbandingan Laju Inflasi Kota Lhokseumawe dengan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2012 s.d 2016 .....	II-20
Gambar 2.19	Perkembangan IPM Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	II-21
Gambar 3.1	Tren Realisasi APBK Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	III-5
Gambar 3.2	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-6
Gambar 3.3	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-8
Gambar 3.4	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-10

Gambar 3.5	Pertumbuhan Realisasi Dana Perimbangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-12
Gambar 3.6	Pertumbuhan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	III-13
Gambar 4.1	Rasio Kemandirian Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-4
Gambar 4.2	Rasio Efektivitas PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-6
Gambar 4.3	Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-7
Gambar 4.4	Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-8
Gambar 4.5	Rasio Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-9
Gambar 4.6	Rasio Efektivitas Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-10
Gambar 4.7	Rasio Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-11
Gambar 4.8	Rasio Aktivitas Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .....	IV-14

## BAB - I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-undang yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat

menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi (a). hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (b). kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga; (c). penerimaan daerah; (d). pengeluaran daerah; (e). kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan (f). kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Secara garis besar, kebijakan pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe tercermin pada komponen anggaran itu sendiri yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja daerah serta ketepatan penggunaan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah terutama dari sektor pendapatan asli daerah seperti kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan agar memperoleh hasil yang optimal, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah, serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru.

Selanjutnya, kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe diarahkan pada kebutuhan obyektif, efektif, dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe. Sementara untuk kebijakan pembiayaan dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Hal ini merupakan upaya preventif dalam mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Indikator kemandirian keuangan suatu daerah adalah Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan dan Pinjaman, dengan demikian PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah

yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Sedangkan Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi Persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti Persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio pertumbuhan merupakan langkah untuk mengukur seberapa besar keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai pada periode-periode berikutnya.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka maksud dan tujuan dilakukan analisis kajian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah pada periode anggaran 2012-2016; untuk mengetahui

kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah pada periode anggaran 2012-2016; untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan rasio aktivitas pada periode anggaran 2012-2016; serta untuk mengetahui trend pertumbuhan kemandirian keuangan Kota Lhokseumawe pada periode anggaran 2012-2016.

### **1.3. Metodologi dan Sistematika Penulisan**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Sumber data penelitian yang akan digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan (data anggaran dan pendapatan, serta realisasi anggaran APBK) Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2012-2016.

Susunan penulisan kajian ini terdiri dari lima bab. Bab Satu berupa pendahuluan yang memuat latar belakang; maksud dan tujuan; metodologi; dan sistematika kajian. Bab dua akan membahas tentang kondisi umum daerah. Selanjutnya bab tiga memuat gambaran umum keuangan Kota Lhokseumawe. Bab empat akan membahas tentang analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio aktivitas keuangan Kota Lhokseumawe. Serta bab lima berupa penutup.

## BAB - II

### GAMBARAN UMUM DAERAH

#### KOTA LHOKSEUMAWE

#### 2.1. Kondisi Umum Geografis Daerah

##### 1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu Kota dari 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang berada pada jalur strategis distribusi dan perdagangan bagi Provinsi Aceh. Hal ini karena keberadaan Kota Lhokseumawe pada titik tengah antara Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dengan Medan sebagai Ibukota Sumatera Utara. Secara Astronomis Kota Lhokseumawe berada pada posisi  $04^{\circ} 54'$  –  $05^{\circ} 18'$  Lintang Utara dan  $96^{\circ} 20'$  –  $97^{\circ} 21'$  Bujur Timur. Adapun batas dari Kota Lhokseumawe yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Kuta Makmur);
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Dewantara);
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Syamtalira Bayu).

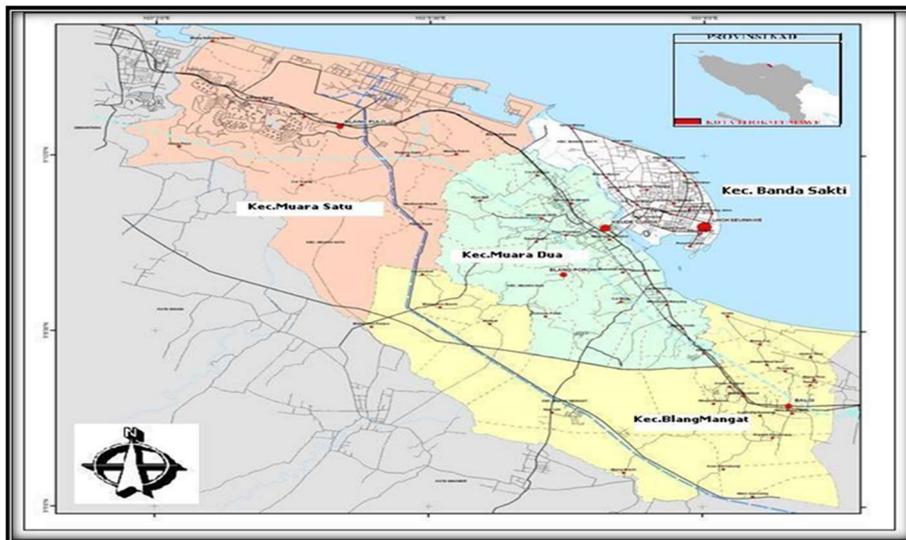
Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian 2-24 meter di atas permukaan laut dimana memiliki luas wilayah  $181,06 \text{ Km}^2$  atau  $18.106,00 \text{ Ha}$  yang dibagi dalam 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Dua dengan luas wilayah  $57,80 \text{ Km}^2$ , Banda Sakti dengan luas wilayah  $11,24 \text{ Km}^2$ , Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah  $56,12 \text{ Km}^2$ , dan Kecamatan Muara Satu dengan luas wilayah  $55,90 \text{ Km}^2$ . Dari Keempat Kecamatan tersebut terdapat 9 (Sembilan) Kemukiman dan 68 (enam puluh delapan) Gampong.

**Gambar 2.1**  
**Letak Kota Lhokseumawe**



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe 2012-2032

**Gambar 2.2**  
**Peta Kota Lhokseumawe**



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe 2012-2032

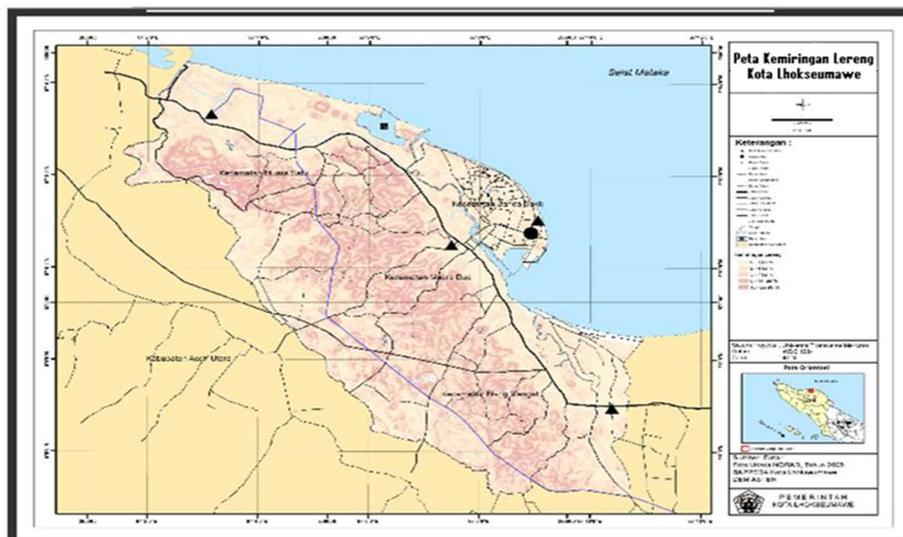
## 2. Topografi

Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara

0-8 %. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0-100 mdpl. Daerah pesisir di sebelah utara dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan pada daerah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 mdpl. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan.

**Gambar 2.3**

**Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe**



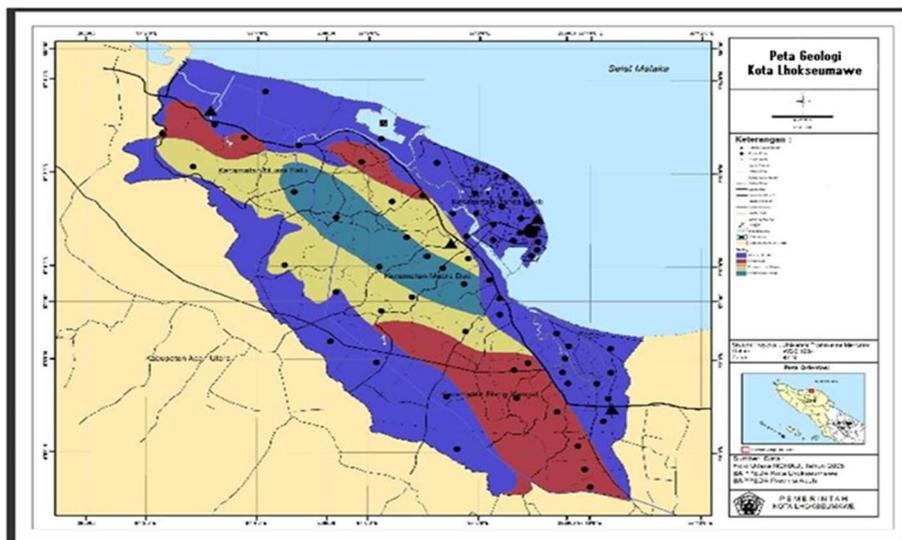
Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe 2012-2032

### 3. Geologi

Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh bantuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayu dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluviatill berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi

Julurayeu berupa endapan sungai batupasir tufaan, lempung berlignit, dan batu lumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batupasir gunung api, dan batu lumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

**Gambar 2.4**  
**Peta Geologi Kota Lhokseumawe**

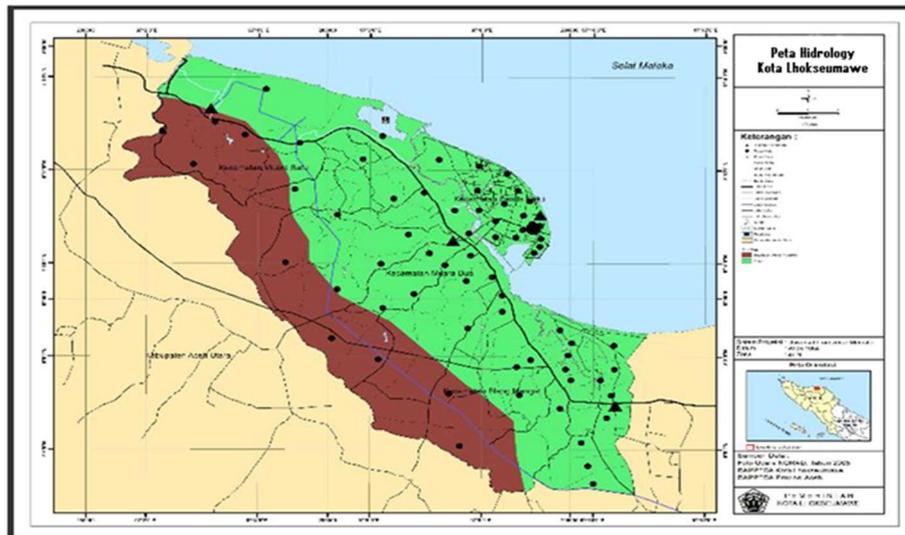


Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe 2012-2032

#### 4. Hidrologi

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe. Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan Krueng (Sungai) Cunda yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

**Gambar 2.5**  
**Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe**

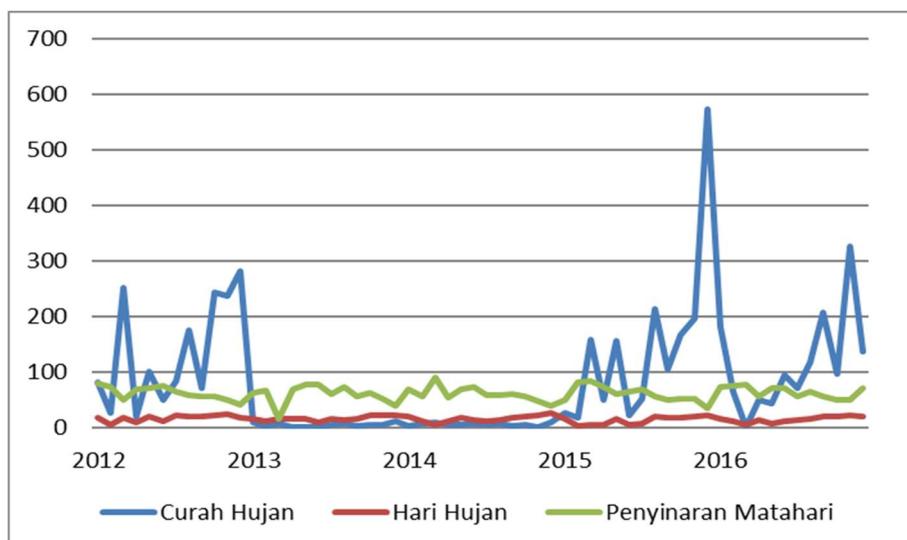


Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe 2012-2032

## 5. Klimatologi

Rata-rata curah hujan, hari hujan dan penyinaran matahari setiap bulan dari tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Gambar 2.6**  
**Klimatologi Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016**

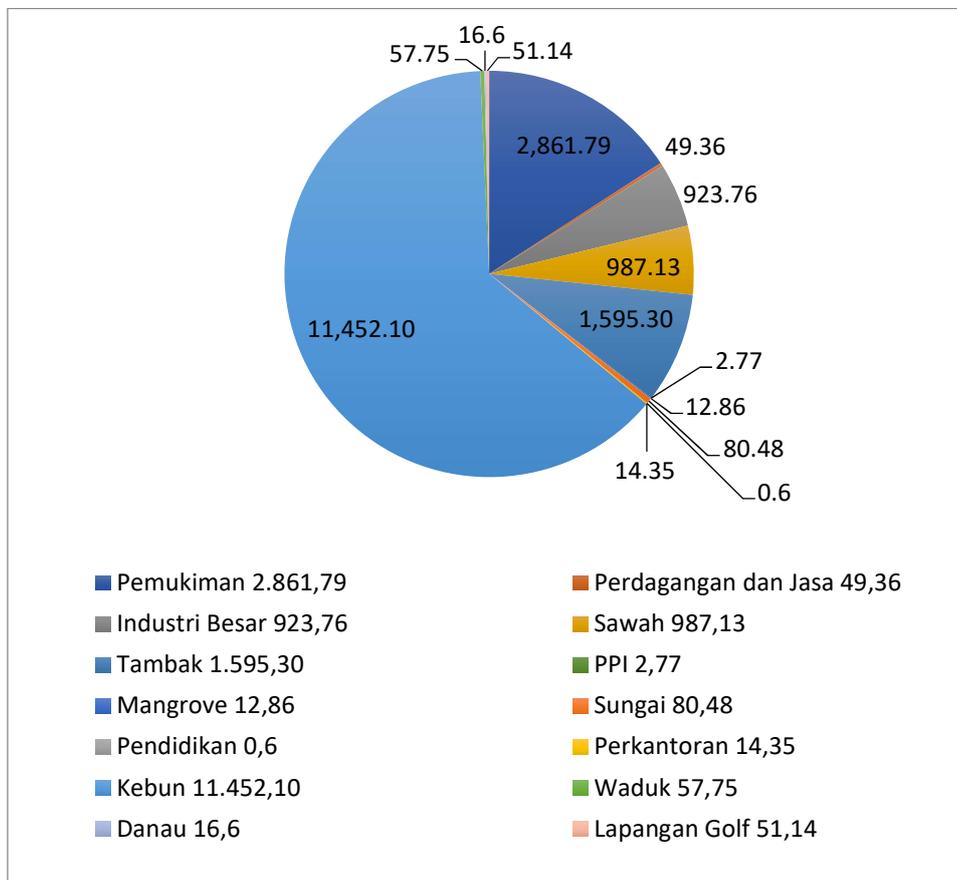


Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun (2013-2016).

## 6. Penggunaan Lahan

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km<sup>2</sup> dengan penggunaan lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman dan diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa. Untuk Lebih jelas mengenai kondisi penggunaan lahan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

**Gambar 2.7**  
**Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha)**



Sumber : Lhokseumae Dalam Angka tahun 2016 (diolah)

## 7. Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 merupakan dokumen arah pengembangan kawasan Kota Lhokseumawe yang

berguna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dalam dokumen RTRW dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) zona pengembangan wilayah, yaitu :

1. Zona pesisir, merupakan daerah pinggiran pantai dan memiliki kondisi wilayah relatif datar, zona pesisir mencakup :
  - Zona Pesisir di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor industri besar, industri menengah dan pariwisata;
  - Zona Pesisir di Kecamatan Banda sakti dengan kegiatan utamanya untuk pelayanan kota seperti: pendidikan, pemerintahan, kesehatan, permukiman dan pariwisata, perdagangan dan jasa;
  - Zona pesisir di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perikanan laut, dan sektor perikanan darat.
2. Zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan Banda Aceh - Medan, memiliki kondisi wilayah relatif datar dan berbukit, wilayah ini mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi perdagangan dan permukiman.
3. Zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi disekitar Jalan Elak memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan sebagian permukiman.

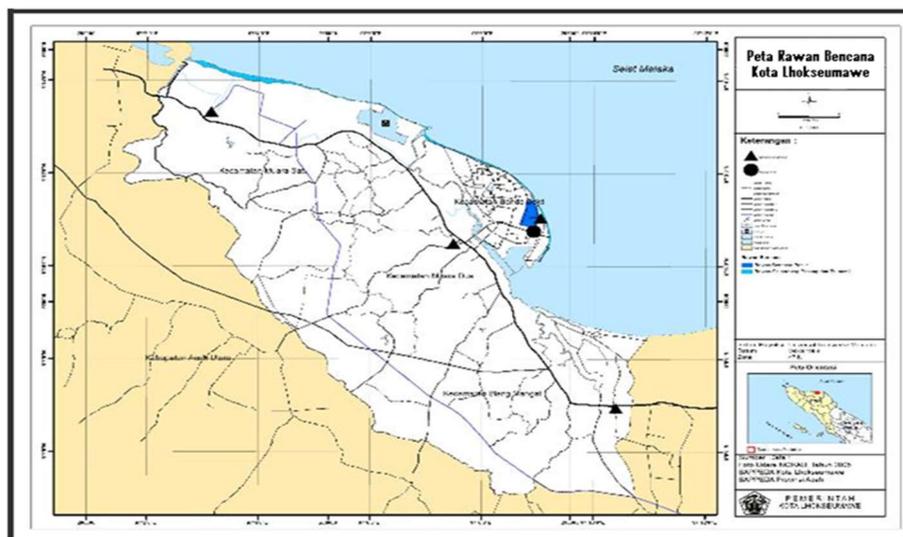
## **8. Wilayah Rawan Bencana**

Kota Lhokseumawe merupakan kawasan yang berpotensi terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi dan gelombang pasang. Wilayah rawan bencana Kota Lhokseumawe didominasi pada kawasan

lindung dan sebagian kawasan budidaya, sehingga diperlukan pengelolaan intensif terutama yang berada pada kawasan budidaya. Dengan adanya resiko kerawanan terhadap bencana pada kawasan budidaya ini tidak berarti bahwa pada kawasan tersebut tidak dapat dibangun, akan tetapi pemanfaatannya harus disertai dengan upaya untuk mengantisipasi/ mengurangi (mitigasi) dari terjadinya dampak bencana alam.

Selain itu, Kota Lhokseumawe juga merupakan kawasan yang rawan bencana abrasi, gelombang pasang seperti Pantai Ujong Blang, Rancung, dan Meuraksa. Sedangkan kawasan yang rawan akan bencana banjir terdapat di Kecamatan Banda Sakti, meliputi Gampong Jawa, Gampong Jawa Lama, Lancang Garam, dan Tumpok Teungoh. Berikut Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe:

**Gambar 2.8**  
**Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe**



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

## 2.2. Kondisi Demografi

Tahun 2016 jumlah penduduk Kota Lhokseumawe sebanyak 195.186 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 97.299 jiwa laki-laki dan 97.887 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Banda

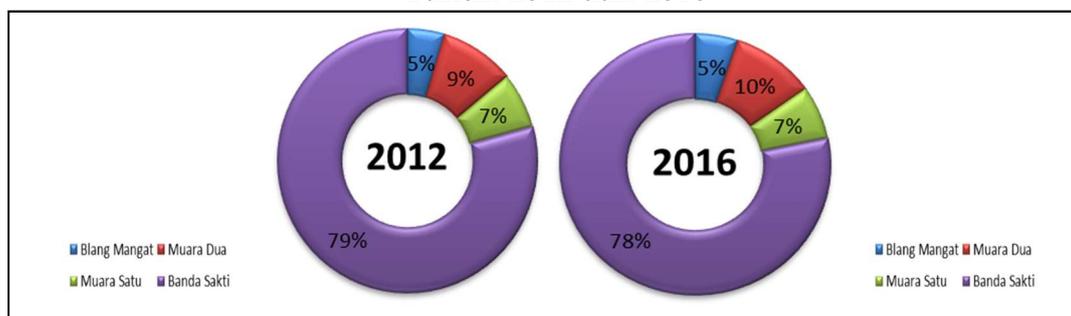
Sakti sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Blang Mangat. Konsentrasi jumlah penduduk di Kecamatan Banda Sakti ini dikarenakan kecamatan ini merupakan pusat Kota Lhokseumawe dengan berbagai kegiatan utama yaitu pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan kesehatan. Lebih jelas mengenai jumlah dan kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2015 dan 2016**

	Nama Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) (3+4)/2
			Pria	Wanita	Total	
	1	2	3	4	3+4	(3+4)/2
2012	Blang Mangat	56,12	11.386	11.464	22.850	407
	Muara Dua	57,80	23.172	23.474	46.646	807
	Muara Satu	55,90	16.437	16.538	32.975	590
	Banda Sakti	11,24	38.606	38.730	77.336	6.880
	<b>Jumlah</b>	<b>181,06</b>	<b>89.601</b>	<b>90.206</b>	<b>179.807</b>	
2016	Blang Mangat	56,12	13.409	13.461	26.870	479
	Muara Dua	57,80	26.638	27.128	53.766	930
	Muara Satu	55,90	16.613	16.750	33.363	597
	Banda Sakti	11,24	40.639	40.548	81.187	7.223
	<b>Jumlah</b>	<b>181,06</b>	<b>97.299</b>	<b>97.887</b>	<b>195.186</b>	

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2016.

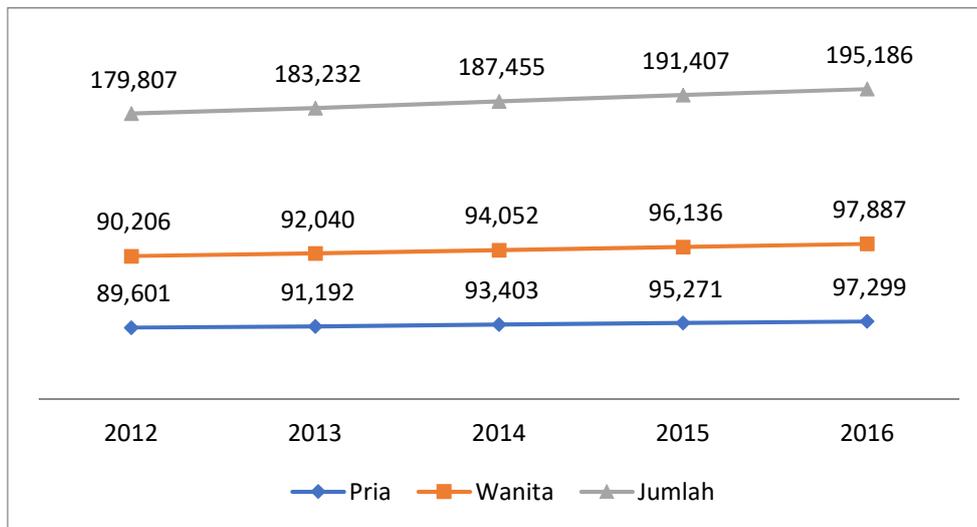
**Gambar 2.9**  
**Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 dan 2016**



Sumber: Data diolah, 2017.

Pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan rata-rata penduduk Kota Lhokseumawe tersebut sebesar 8%. Demikian pula pada beberapa wilayah kecamatan, secara umum mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berikut grafik laju pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe;

**Gambar 2.10**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016**



Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2017 (diolah)

### 2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

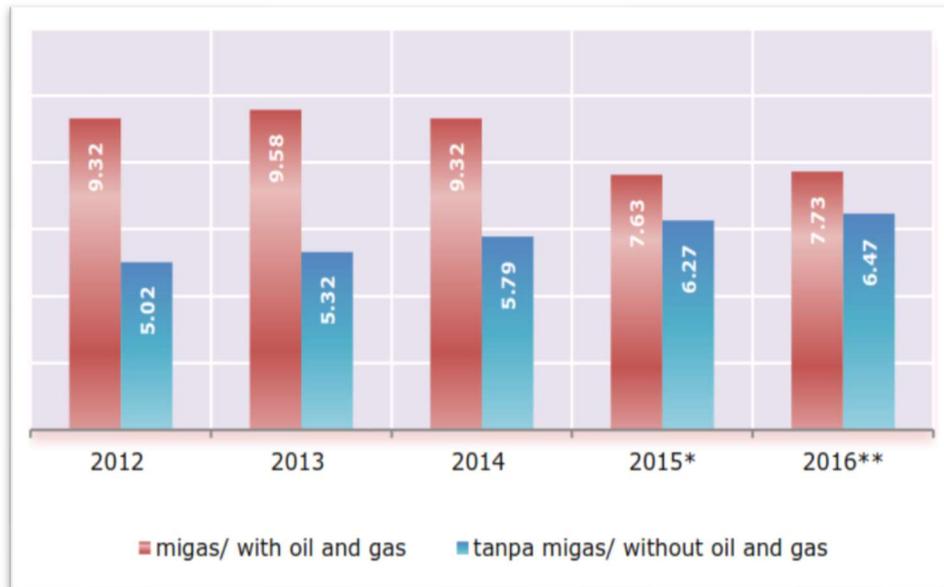
PDRB ADHB dengan migas Kota Lhokseumawe selama lima tahun terakhir mengalami pergerakan naik dan turun tiap tahunnya. Tahun 2016, nilainya mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,10 triliun rupiah, dari 7,63 triliun rupiah menjadi 7,73 triliun rupiah dibandingkan tahun 2015. Sebelumnya, selama tahun 2013-2015, PDRB ADHB dengan migas mengalami kecenderungan penurunan. Tahun 2015, nilainya anjlok sebesar 1,69 triliun rupiah dibandingkan tahun 2014. Penurunan PDRB ADHB tahun 2014 mencapai 0,26 triliun rupiah dibandingkan tahun 2013.

**Tabel 2.2**  
**PDRB Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2012 s.d 2016 (triliun rupiah)**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
PDRB Dengan Migas	9.32	9.58	9.32	7.63	7.73
PDRB Tanpa Migas	5.02	5.32	5.79	6.27	6.47

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2017

**Gambar 2.11**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 (triliun rupiah)**



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2017

Berbeda dengan PDRB memperhitungkan migas, PDRB ADHB tanpa memperhitungkan migas selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,36 triliun rupiah per tahun. PDRB ADHB tahun 2016 mencapai 6,47 triliun rupiah. Nilai ini meningkat sebesar 0,20 triliun rupiah dari tahun 2015. Tahun sebelumnya, PDRB ADHB 2012-2015 mengalami peningkatan dari 5,02 menjadi 6,27 triliun rupiah.

Nilai PDRB dengan mengabaikan faktor harga menunjukkan nilai PDRB secara riil yang secara umum disebut sebagai PDRB ADHK. Peningkatan yang kontinu menunjukkan produktivitas yang terus meningkat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB ADHK dengan migas mengalami penurunan sebesar 2,52 triliun rupiah dari 8,98 triliun rupiah di tahun 2012 menjadi 6,46 triliun rupiah di tahun 2016.

Sedangkan nilai PDRB ADHK tanpa migas pada tahun 2012-2016 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,18 triliun rupiah tiap tahunnya,

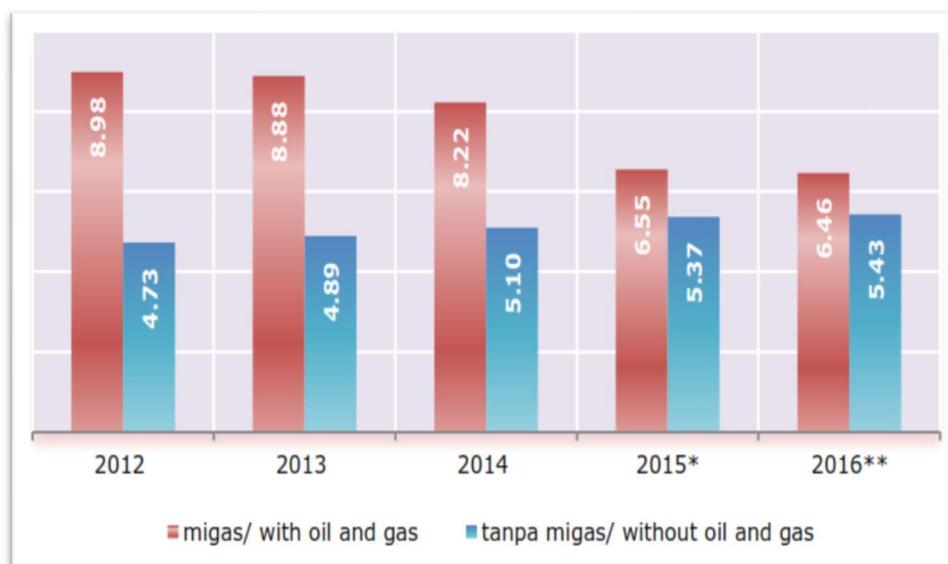
dengan nilai 5,43 triliun rupiah tahun 2016 atau meningkat sebesar 0,70 triliun dari tahun 2012.

**Tabel 2.3**  
**PDRB Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2012 s.d 2016 (triliun rupiah)**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
PDRB Dengan Migas	8.98	8.88	8.22	6.55	6.46
PDRB Tanpa Migas	4.73	4.89	5.10	5.37	5.43

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2017

**Gambar 2.12**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 (triliun rupiah)**



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2017

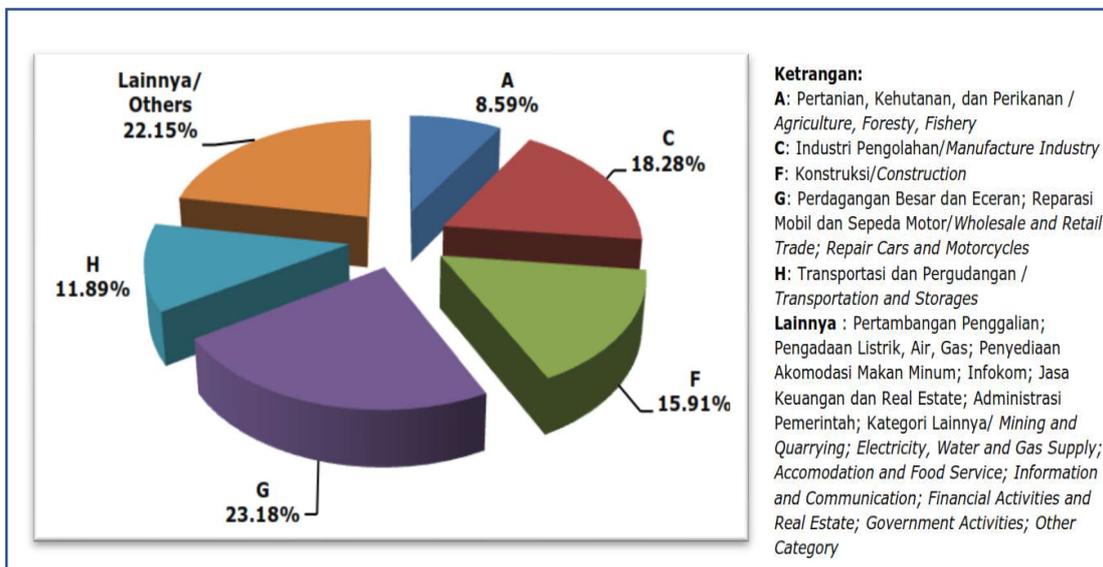
Selama 5 tahun terakhir (2012-2016), terlihat bahwa rata-rata perubahan PDRB ADHB cenderung lebih besar daripada perubahan kenaikan PDRB ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan karena harga lebih dominan daripada kenaikan karena produktivitas.

Sejak tahun 2015, struktur ekonomi Kota Lhokseumawe didominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor. Peranan kategori ini meningkat dari 15,76 persen di tahun 2012 menjadi 23,18 persen di tahun 2016.

Kategori dengan peranan kedua terbesar adalah industri pengolahan sebesar 18,28 persen. Kategori ini mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 47,40 persen. Kategori konstruksi menempati urutan ketiga dengan peranan sebesar 15,91 persen. Kategori ini mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 9,31 persen.

**Gambar 2.13**  
**Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe**  
**dengan Migas Tahun 2016 (persen)**



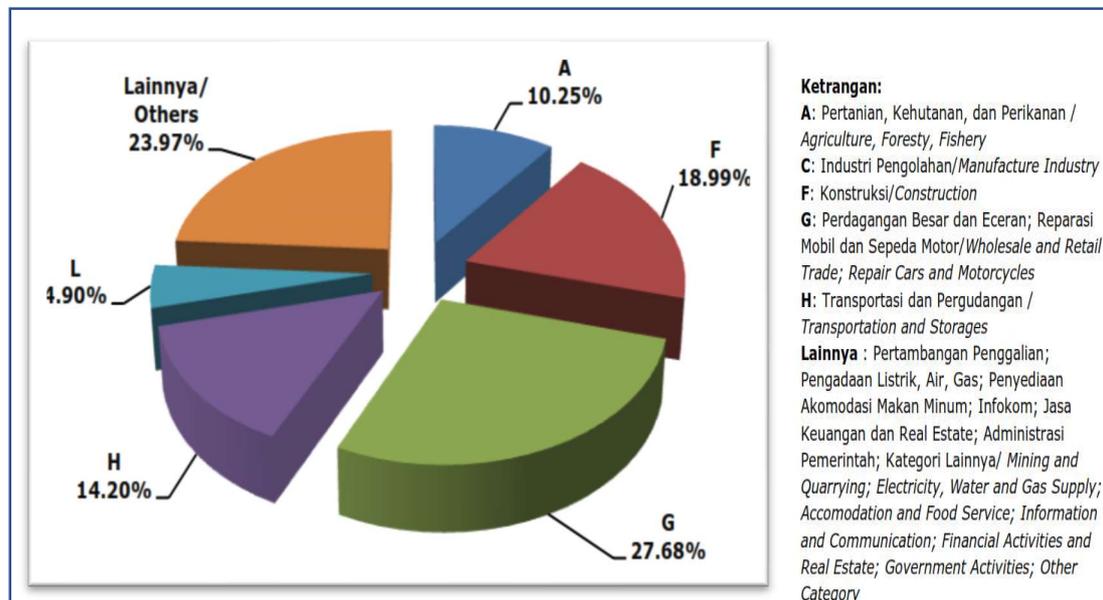
Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2017

Kategori berikutnya yang cukup memberi kontribusi yaitu kategori Transportasi dan Pergudangan serta kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dengan kontribusi kategori Transportasi dan Pergudangan berada pada angka 11,89 persen dan kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,59 persen.

Jika dipisahkan industri migas dari PDRB maka semakin terlihatlah bahwa kategori yang dominan di Lhokseumawe yaitu kategori perdagangan, disusul kategori konstruksi, dan transportasi.

Pada tahun 2016 dapat kita lihat bahwa kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberi sumbangsih mencapai 27,68 persen, lalu kategori Konstruksi mencapai 18,99 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan mencapai 14,20 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan bahkan muncul dengan share sebesar 10,25 persen dan kategori real estate mencapai 4,90 persen.

**Gambar 2.14**  
**Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe**  
**Tanpa Migas Tahun 2016 (persen)**



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2017

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu dengan migas dan tanpa migas. Pergerakan ekonomi dengan migas dan tanpa migas cukup berbeda.

Selama lima tahun terakhir (2012-2016), pertumbuhan ekonomi dengan migas Lhokseumawe mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini terjadi karena kategori migas yang banyak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi terus menurun. Pada tahun 2016, Lhokseumawe mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 1,34 persen, sedangkan tanpa migas

terlihat bahwa tahun 2016 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,18 persen.

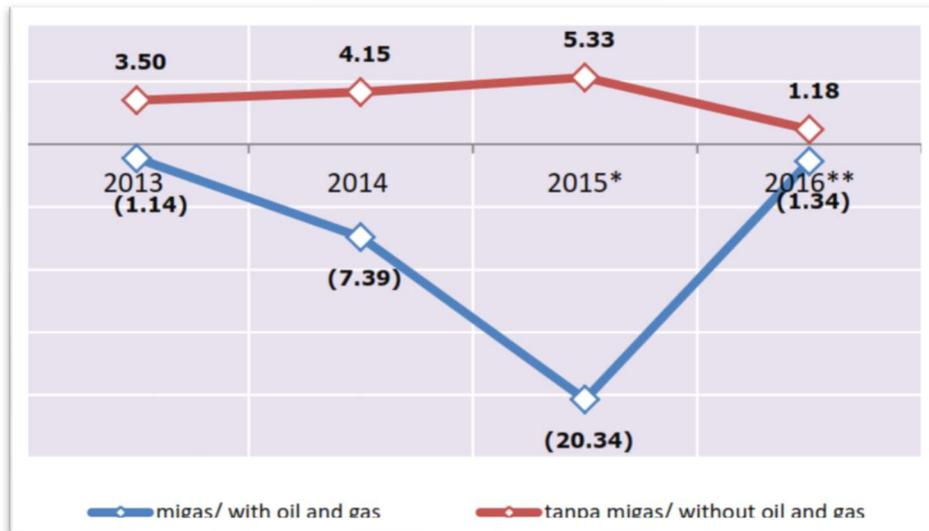
Jika dilihat lebih rinci di tahun 2016, terdapat tiga kategori yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu kategori Industri Pengolahan (11,27 persen), kategori Konstruksi (4,60 persen), dan kategori Transportasi dan Pergudangan (0,79 persen). Selain kategori tersebut, kategori lain menunjukkan pertumbuhan yang positif. Enam kategori dengan pertumbuhan di atas 8 persen adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 29,30 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,30 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,87 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,95 persen, Jasa lainnya sebesar 8,80 persen, dan real estate sebesar 8,24 persen.

**Tabel 2.4**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2013 s.d 2016 (persen)**

Uraian	2013	2014	2015*	2016**
Pertumbuhan Tanpa Migas	3.50	4.15	5.33	1.18
Pertumbuhan Dengan Migas	(1.14)	(7.39)	(20.34)	(1.36)

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2017

**Gambar 2.15**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2013 s.d 2016 (persen)**



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2017

Salah satu indikator awal yang menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah PDRB Per Kapita. PDRB Per kapita Lhokseumawe dengan migas sedikit terlihat semakin menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tahun 2012 sampai tahun 2016, PDRB Per Kapita ADHB menunjukkan nilai 52,20 juta rupiah dan terus mengalami penurunan hingga 39,60 juta rupiah pada 2016.

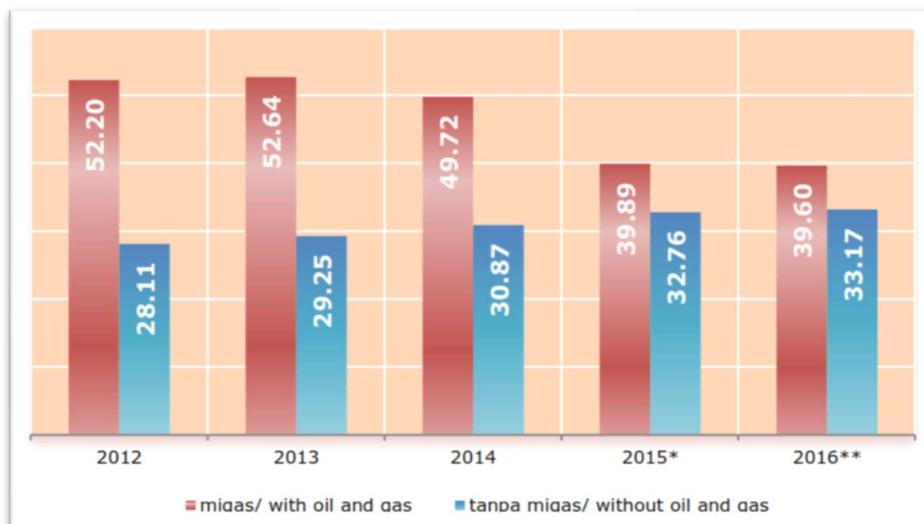
Sedangkan PDRB Lhokseumawe per kapita ADHB non migas meskipun terlihat tidak setinggi PDRB ADHB migas namun tumbuh setiap tahunnya. Tahun 2016, nilai PDRB perkapita ADHK mencapai 33,17 juta rupiah meningkat sebesar 5,06 juta rupiah sejak tahun 2012.

**Tabel 2.5**  
**PDRB Per Kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2012 s.d 2016 (Juta Rupiah)**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
PDRB Per Kapita Migas	52.20	52.64	49.72	39.89	39.60
PDRB Per Kapita Tanpa Migas	28.11	29.25	30.87	32.76	33.17

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2017

**Gambar 2.16**  
**PDRB Per Kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2012 s.d 2016 (Juta Rupiah)**



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2017

Untuk nilai PDRB per kapita harga konstan dengan migas mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan untuk PDRB per kapita harga konstan tanpa migas nilainya tumbuh positif namun sangat kecil. Tahun 2012 PDRB per kapita ADHK dengan migas sebesar 50,29 juta rupiah dan terus menurun mencapai angka 33,11 juta rupiah di tahun 2016.

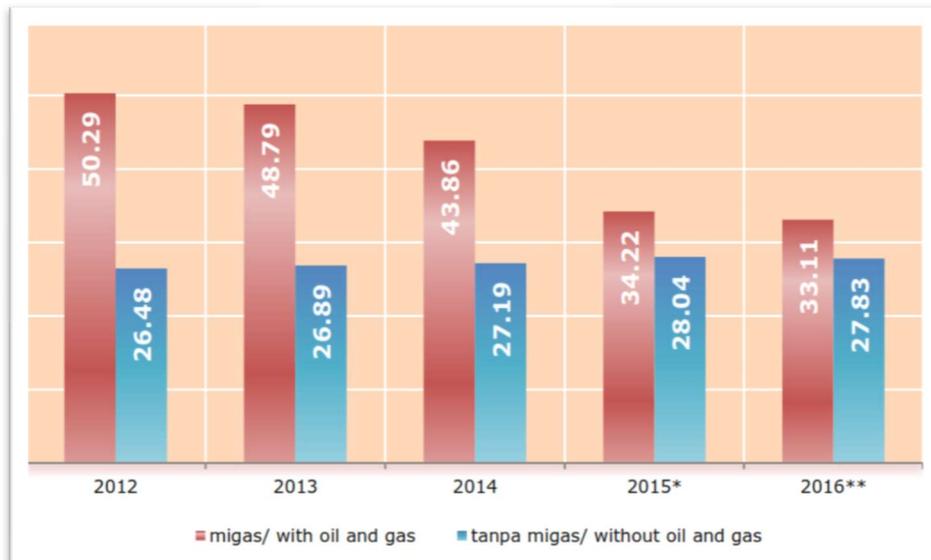
Kemudian jika PDRB per kapita ADHK ditinjau tanpa migas, nilai PDRB per kapita tahun 2012 sebesar 26,48 juta rupiah dan berturut-turut tahun 2013-2015 bernilai 26,89 juta rupiah, 27,19 juta rupiah, dan 28,04 juta rupiah. Pada tahun 2016 PDRB per kapita ADHK mencapai sebesar 27,83 triliun rupiah.

**Tabel 2.6**  
**PDRB Per Kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2012 s.d 2016 (Juta Rupiah)**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
PDRB Per Kapita Migas	50.29	48.79	43.86	34.22	33.11
PDRB Per Kapita Tanpa Migas	26.48	26.89	27.19	28.04	24.83

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2017

**Gambar 2.17**  
**PDRB Per Kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2012 s.d 2016 (Juta Rupiah)**

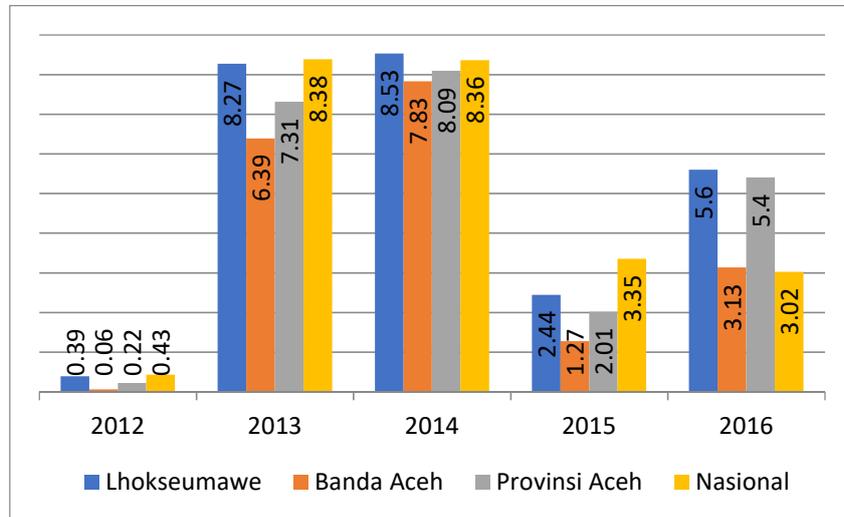


Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2017

#### 2.4. Laju Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan nilai harga (barang/jasa) umum yang terjadi secara terus menerus. Peningkatan inflasi akan berdampak pada penurunan perkembangan ekonomi, dan secara umum akan menurunkan daya saing ekonomi. Dampak lain dari peningkatan inflasi ialah bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan riil masyarakat, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Laju inflasi berdasarkan data BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2017 untuk Kota Lhokseumawe, Banda Aceh, Provinsi dan Nasional pada gambar berikut.

**Gambar 2.18**  
**Perbandingan Laju Inflasi Kota Lhokseumawe dengan Kota Banda Aceh,**  
**Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2012 s.d 2016**



Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2017.

**Tabel 2.7**  
**Perbandingan Laju Inflasi Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh,**  
**Aceh dan Nasional Tahun 2012 s.d 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Lhokseumawe	0.39	8.27	8.53	2.44	5.60
Kota Banda Aceh	0.06	6.39	7.83	1.27	3.13
Aceh	0.22	7.31	8.09	2.01	5.40
Nasional	0.43	8.38	8.36	3.35	3.02

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2017

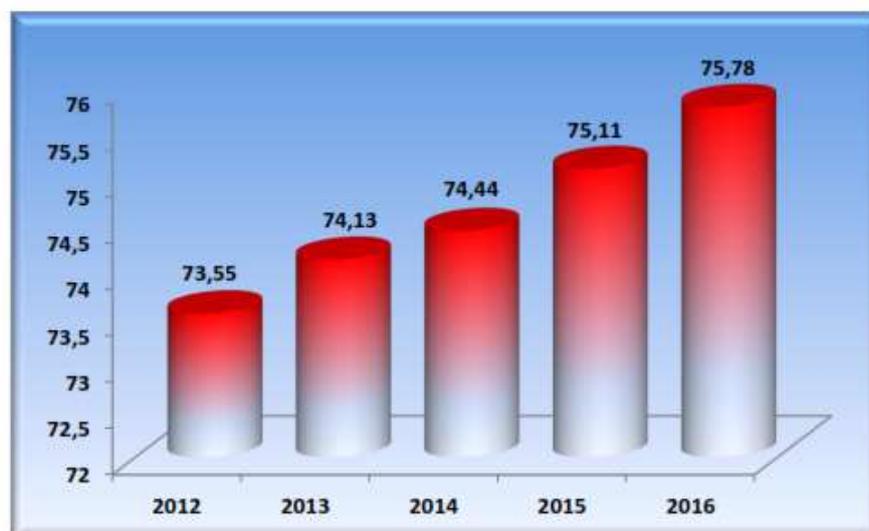
## 2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup yang layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar yang antara lain mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dalam pengukuran dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup saat lahir, pengukuran dimensi pengetahuan menggunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan pengukuran dimensi standar hidup layak menggunakan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

Perkembangan IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang menyusunnya. Kemajuan IPM sangat tergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Perkembangan komponen-komponen penyusun IPM selanjutnya akan dibahas untuk melihat komponen-komponen mana yang berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan capaian IPM Kota Lhokseumawe.

**Gambar 2.19**  
**Perkembangan IPM Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016**



Sumber : IPM Kota Lhokseumawe, BPS, 2017

Grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan IPM Lhokseumawe mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2012 – 2016,

dengan rata-rata perkembangan sebesar 0,56 poin. Peningkatan IPM terbesar terjadi selama kurun waktu 2014 - 2016 yakni mengalami peningkatan 0,67 poin setiap tahunnya, dan terendah selama kurun waktu 2013 - 2014 yakni 0,31 poin. Dengan nilai IPM sebesar 75,78 pada tahun 2016, maka status IPM Kota Lhokseumawe berada pada tingkatan Menengah Atas. Adapun perkembangan dari masing-masing komponen penyusun IPM di Kota Lhokseumawe tahun 2012 - 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Perkembangan Komponen Penyusun IPM Kota Lokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016**

No.	Komponen Penyusun IPM	2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Harapan Hidup	70.59	70.61	70.62	70.96	71.05
2	Harapan Lama Sekolah	14.91	14.92	15.11	15.14	15.16
3	Rata-rata Lama Sekolah	10.16	10.37	10.39	10.41	10.53
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	9303	9580	9678	10093	10549

Sumber : IPM Kota Lhokseumawe, BPS, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap angka komponen penyusun IPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan berkelanjutan baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Tetapi, angka yang telah dicapai belum optimal sehingga dianggap perlu bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang akan menaikkan nilai komponen penyusun IPM secara signifikan.

## **2.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2012-2017**

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe tahun 2012-2017 adalah mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Bermartabat Sejahtera Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai Wujud MoU Helsinki. Untuk tercapainya tujuan tersebut ditempuh melalui penetapan strategi dan arah kebijakan

pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2012-2017 sebagaimana termaktub dalam RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

**1. Misi Pertama** : Menjalankan tata kelola Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang amanah dengan mengimplementasikan UUPA;

*Strategi (1)* : menjalankan implementasi UUPA dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

*Arah Kebijakan* :

- a. Mensosialisasikan dan melaksanakan UUPA dan turunan peraturan pelaksanaan UUPA sebagai konsekwensi dari hasil MoU Helsinki;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. meningkatkan ketertiban, pembinaan dan pengembangan politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan dalam tatanan pengelolaan pemerintahan.

*Strategi (2)* : Melakukan reformasi birokrasi dalam struktur maupun alokasi SDM.

*Arah Kebijakan* :

- a. Mengkaji ulang struktur organisasi tata kerja (SOTK) pemerintah Kota Lhokseumawe yang sesuai kebutuhan beban tugas dan fungsinya.;
- b. Meningkatkan sumberdaya aparatur dan kedisiplinan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Meningkatkan pelayanan perizinan terpadu.

*Strategi (3)* : Memperkuat birokrasi pemerintahan dengan penguatan sistem penataan kelembagaan satuan kerja dalam perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengawasan evaluasi serta p elaporan pembangunan yang akuntabel transparan.

*Arah Kebijakan :*

- a. Menyediakan Data Base Pemerintahan dan Peningkatan Informasi Publik Melalui Pengembangan e-Iptek (Red; Simpeg dll);
- b. Melaksanakan tertib administrasi perkantoran dan terpenuhinya fasilitas kebutuhan kantor;
- c. Pengembangan perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan serta penyediaan pusat data dan informasi berbasis *e-planing*.

*Strategi (4) : Penguatan sistem kelembagaan yang memiliki nilai-nilai demokrasi yang diitik-beratkan kepada prinsip-prinsip trnsparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi dan kemitraan.*

*Arah Kebijakan :*

- a. Fasilitasi penguatan pengawasan keuangan daerah dan pembinaan administrasi anggaran daerah secara transparan dan akuntabel;
- b. Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe untuk memperoleh status penilaian wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

*Strategi (5) : mewujudkan kemandirian keuangan daerah.*

*Arah Kebijakan :*

- a. Penyusunan peraturan daerah sebgai dasar hukum peningkatan kemandirian keuangan kota lhokseumawe;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

**2. Misi Kedua :** Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat

*Strategi (1) : Menciptakan kegiatan bagi masyarakat tentang sejarah Aceh dan nilai budaya dalam tatanan kehidupan.*

*Arah Kebijakan :*

- a. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi pemahaman sejarah dan nilai budaya aceh;
- b. pengembangan nilai budaya aceh dan Menyebarkan informasi sejarah kepada masyarakat.

*Strategi (2) :* Penghayatan dan pengamalann karakter islami dalam kehidupan masyarakat.

*Arah Kebijakan :*

- a. meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur pelaksana nilai- nilai dinul islam dan peran serta ulama dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Menyemarakkan syiar islam.

*Strategi (3) :* Penghayatan dan pengamalan nilai dinul islam dalam kehidupan sehari-hari.

*Arah Kebijakan :*

- a. Mensosialisasikan qanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam;
- b. peningkatan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung penerapan agama bagi masyarakat.

**3. Misi Ketiga :** Memperkuat struktur sosial ekonomi , peningkatan nilai tambah produksi masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan SDA.

*Strategi (1) :* Peningkatan pemanfaatan sumberdaya keunggulan kompetitif pada sektor pertanian industry, perdagangan dan pariwisata.

*Arah Kebijakan :*

- a. Menumbuh kembangkan komoditas unggulan daerah yang sesuai dengan agro ekosistem wilayah dalam upaya menciptakan mata pencaharian tetap kepada masyarakat dengan skala usaha menguntungkan;
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan sektor jasa, industri, perdagangan dan pariwisata;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah hinterland dan status Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- d. Pengembangan kawasan sentra industri;
- e. Peningkatan keamanan dan kepastian hukum untuk menciptakan iklim investasi yg kondusif;
- f. Peningkatan nilai tambah dan daya saing agro industri secara berkelanjutan dan berkeadilan;
- g. Peningkatan SDM dunia usaha industri kecil dan menengah.

*Strategi (2)* : Peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

*Arah Kebijakan :*

- a. Perlindungan sosial bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- b. Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan.

*Strategi (3)* : Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat melalui perluasan lapangan usaha, peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

*Arah Kebijakan :*

- a. Memberdayakan UMKM yang telah ada dan membina koperasi secara profesional;

- b. Mengembangkan keahlian daya saing tenaga kerja yang memiliki standarisasi dan jiwa kewirausahaan dan akses kesempatan kerja;
- c. Pengembangan industri dan pariwisata berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

*Strategi (4)* : Penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan.

*Arah Kebijakan* : Perluasan areal pertanian serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.

*Strategi (5)* : Penyediaan akses terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin dan fasilitas usaha mikro; pengolahan hasil pertanian dan perikanan budidaya yang berkelanjutan dengan penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas investasi dalam mengembangkan usaha penjamin hasil produksi pertanian dan perikanan.

*Arah Kebijakan* :

- a. Pemberian subsidi bagi masyarakat miskin dan bantuan usaha mikro;
- b. Pengembangan investasi swasta, baik yang bersumber dari pengusaha lokal yang ada di daerah, atau pengusaha yang berada di luar daerah, ataupun kemampuan pengusaha daerah untuk menarik pengusaha luar daerah bahkan luar negeri untuk berinvestasi melalui pembentukan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat.

*Strategi (6)* : pemanfaatan sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah.

*Arah Kebijakan* : pengendalian lingkungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam

*Strategi (7)* : Mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata di lokasi pariwisata.

*Arah Kebijakan* : Meningkatkan sarana prasarana untuk pembangunan pariwisata daerah.

**4. Misi Keempat** : Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan

*Strategi (1)* : Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

*Arah Kebijakan* :

- a. Peningkatan kualitas layanan pendidikan formal dan non formal;
- b. Pendidikan wajib belajar menjadi 12 tahun.

*Strategi (2)* : Terciptanya pengembangan dan pembinaan kualitas pendidikan yang bermutu tinggi melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan.

*Arah Kebijakan* : Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta jaringannya.

*Strategi (3)* : Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing lulusan lembaga pendidikan.

*Arah Kebijakan* : Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan.

*Strategi (4)* : Meningkatkan SDM pada bidang Pemuda dan Olahraga.

*Arah Kebijakan* : Peningkatan SDM melalui pembinaan pemuda dan olahraga.

*Strategi (5)* : Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pelayanan kesehatan.

*Arah Kebijakan :*

- a. Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas lembaga kesehatan;
- b. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan.

*Strategi (6) :* Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan.

*Arah Kebijakan :* Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta jaringannya.

*Strategi (7) :* Meningkatkan pemberdayaan dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan.

*Arah Kebijakan :*

- a. Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- b. Peningkatan kepedulian kesehatan masyarakat;
- c. Peningkatan kesehatan bagi ibu dan anak serta lansia.

5. *Misi Kelima :* Melaksanakan pembangunan infrastruktur Kota Lhokseumawe yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan

*Strategi (1) :* Menciptakan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang.

*Arah Kebijakan :*

- a. Peningkatan Kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur;
- b. Peningkatan akses kebutuhan penduduk terhadap air minum, pelayanan pengelolaan persampahan dan air limbah dan sarana prasarana lingkungan permukiman;
- c. Penanganan jumlah rumah yang tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh;
- d. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, dermaga, saluran irigasi, air baku, pengendalian banjir dan pengamanan daerah aliran sungai dan pantai;

- e. Menangani kondisi kejadian-kejadian pra bencana, bencana dan pasca bencana;
- f. Penyusunan perencanaan, dokumentasi dan pengendalian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah/kota.

*Strategi (2)* : menciptakan manajemen pelayanan pembangunan yang optimal.

*Arah Kebijakan* :

- a. Meningkatkan lingkungan hidup yang optimal terhadap perairan laut, pantai, penambangan dan sungai/waduk;
- b. Peningkatan manajemen pelayanan pembangunan.

*Strategi (3)* : Memanfaatkan sumber daya alam yang baru dan tidak terbarukan.

*Arah Kebijakan* : Pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan.

## **BAB - III**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**

#### **3.1. Kinerja Keuangan Kota Lhokseumawe**

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pada prinsipnya keuangan daerah memiliki ruang lingkup, meliputi:

- 1) Hak Daerah;
- 2) Kewajiban Daerah;
- 3) Penerimaan Daerah;
- 4) Pengeluaran Daerah; dan
- 5) Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja pada bidang keuangan daerah yang ditentukan melalui

kebijakan dan peraturan perundang-undangan selama periode anggaran tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe dari tahun 2012 sampai dengan 2016 masih berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,30 persen. Menurut kelompok Pendapatan Kota Lhokseumawe, rata-rata pertumbuhan positif terdapat pada kelompok yang bersumber dari Pendapatan Asli Kota Lhokseumawe yang mencapai 14,82 persen, Dana Perimbangan sebesar 6,74 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 23,28 persen.

Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Kota Lhokseumawe selama periode 2012-2016 mencapai 9,23 persen, yang terdiri dari rata-rata pertumbuhan dari Belanja Tidak Langsung sebesar 6,74 persen dan Belanja Langsung sebesar 12,58 persen. Dengan kata lain, rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung.

Sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Kota Lhokseumawe selama periode 2012-2016 mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu *minus* 16,72 persen. Selengkapnya mengenai realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016 (Milyar Rupiah)**

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertum- buan
		2012	2013	2014	2015	2016	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN KOTA</b>	<b>582.62</b>	<b>643.37</b>	<b>768.27</b>	<b>835.81</b>	<b>908.888</b>	<b>9.30%</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Kota</b>	<b>28.231</b>	<b>36.214</b>	<b>48.730</b>	<b>56.560</b>	<b>56.349</b>	<b>14.82%</b>
1.1.1	Pajak Daerah	11.762	16.132	20.547	21.369	24.519	15.83%
1.1.2	Retribusi Daerah	5.658	6.795	12.618	3.593	3.817	-7.57%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.837	2.454	2.682	4.012	4.253	18.29%
1.1.4	Zakat, Infaq dan Sadaqah	4.438	6.144	6.141	8.646	8.790	14.65%
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	4.536	4.688	6.743	18.940	14.969	26.97%
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>496.725</b>	<b>550.942</b>	<b>565.797</b>	<b>610.875</b>	<b>688.355</b>	<b>6.74%</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	76.450	82.258	62.087	62.431	42.965	-10.89%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	394.260	437.794	469.957	469.107	467.847	3.48%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	26.015	30.890	33.753	79.337	177.543	46.83%
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>57.660</b>	<b>56.217</b>	<b>153.743</b>	<b>168.374</b>	<b>164.185</b>	<b>23.28%</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.819	-	-	-	-	-100%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	11.839	10.838	11.742	19.599	25.208	16.32%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	34.157	44.979	68.149	74.872	48.794	7.39%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.363	0.400	73.853	73.902	73.736	48.06%
1.3.6	Lain-lain Pendapatan	0.481	-	-	-	16.446	102.63%
<b>2</b>	<b>BELANJA KOTA</b>	<b>572.64</b>	<b>633.00</b>	<b>727.48</b>	<b>879.07</b>	<b>890.34</b>	<b>9.23%</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>343.66</b>	<b>385.67</b>	<b>406.64</b>	<b>410.90</b>	<b>476.25</b>	<b>6.74%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	254.294	276.240	280.253	321.049	342.892	6.16%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	13.114	14.653	24.285	6.635	25.924	14.60%

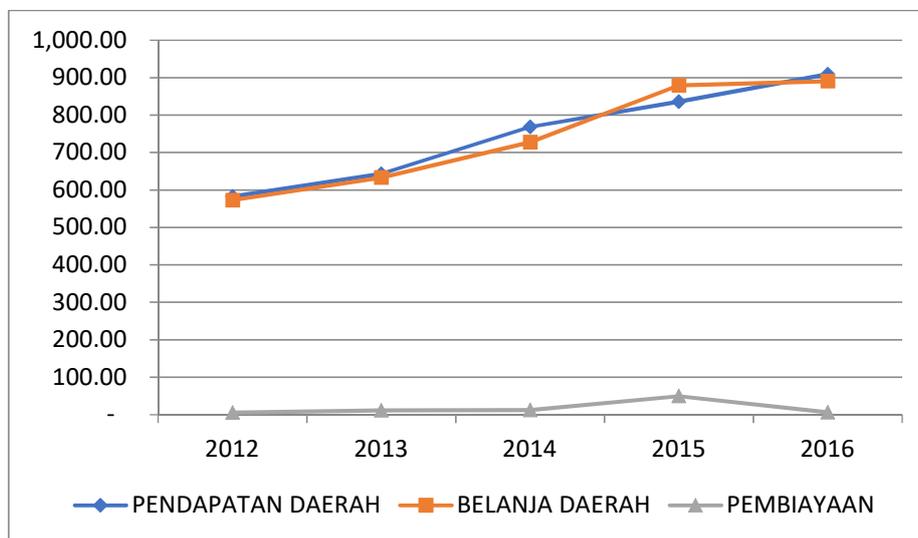
No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	49.978	69.406	72.813	39.815	17.274	-19.14%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan	24.954	24.893	28.291	43.046	89.806	29.19%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.321	0.474	0.999	0.351	0.354	-23.16%
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>228.98</b>	<b>247.33</b>	<b>320.84</b>	<b>468.17</b>	<b>414.09</b>	12.58%
2.2.1	Belanja Pegawai	34.779	40.864	51.876	54.576	53.391	8.95%
2.2.2	Belanja Barang Jasa	87.020	87.234	101.499	190.578	124.713	7.46%
2.2.3	Belanja Modal	107.183	119.231	167.464	223.021	235.985	17.10%
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN KOTA</b>	<b>5.55</b>	<b>11.13</b>	<b>12.55</b>	<b>49.49</b>	<b>6.23</b>	<b>2.33%</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>10.55</b>	<b>16.13</b>	<b>21.95</b>	<b>53.49</b>	<b>6.23</b>	<b>-10.00%</b>
3.1.1	SILPA TA Sebelumnya	10.252	15.525	21.502	53.341	6.231	-9.48%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	0.600	0.450	0.150	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.300	-	-	-	-	-100.%
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>9.40</b>	<b>4.00</b>	<b>-</b>	<b>-100.%</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000	5.000	7.000	4.000	-	-100.%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	2.400	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

Tren realisasi Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan (naik). Sebaliknya, tren realisasi pembiayaan Kota Lhokseumawe cenderung mengalami berfluktuasi. Defisit anggaran terjadi pada tahun 2015, dimana realisasi Belanja Kota

Lhokseumawe lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pendapatan Kota Lhokseumawe. Sementara pada tahun 2012-2014 dan tahun 2016 terdapat surplus anggaran, hal ini disebabkan karena realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe lebih tinggi jika dibandingkan dengan Belanja Kota Lhokseumawe. Gambar berikut menunjukkan tren pendapatan, belanja dan pembiayaan Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2012-2016.

**Gambar 3.1**  
**Tren Realisasi APBK Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016 (Milyar Rupiah)**



### 3.2. Pendapatan Kota Lhokseumawe

Pendapatan Kota Lhokseumawe meliputi semua penerimaan uang yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Kota Lhokseumawe dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kota Lhokseumawe. Pendapatan Kota Lhokseumawe dikelompokkan atas beberapa komponen, yaitu:

- ✓ Pendapatan Asli Daerah;
- ✓ Dana Perimbangan;
- ✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

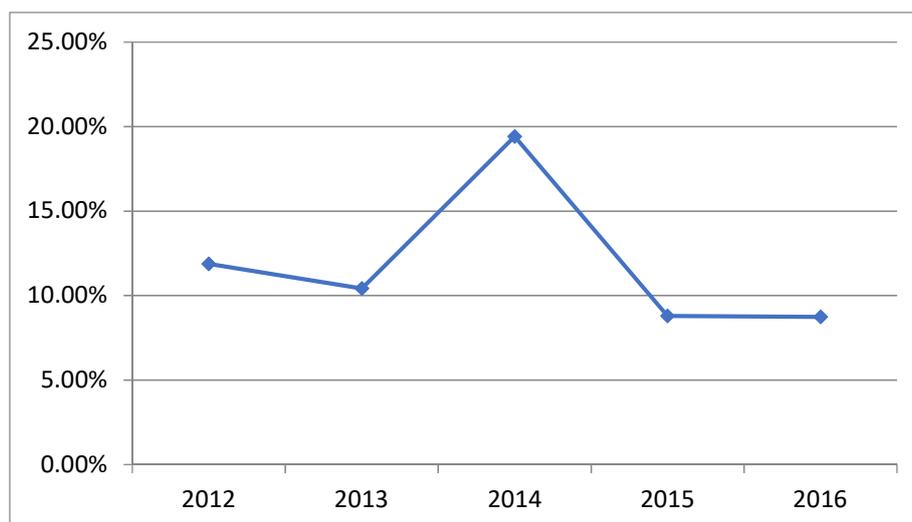
Rata-rata anggaran Pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2012-2016 berjumlah sebesar Rp.843 milyar dengan realisasi mencapai Rp.748 milyar atau sebesar 90,46 persen. Selama tahun 2012-2016, realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe tidak pernah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, anggaran maupun realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif.

**Tabel 3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016 (Milyar Rupiah)**

Tahun	Anggaran (Milyar Rp.)	Realisasi		
		Milyar Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	611.15	582.62	95.33%	11.88%
2013	664.78	643.37	96.78%	10.43%
2014	795.85	768.27	96.53%	19.41%
2015	964.49	835.81	86.66%	8.79%
2016	1,180.65	908.89	76.98%	8.74%
<b>Rata-Rata</b>	<b>843.38</b>	<b>748.79</b>	<b>90.46%</b>	<b>9.30%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

**Gambar 3.2**  
**Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016 (Milyar Rupiah)**



Disamping itu, jika dilihat dari pertumbuhan realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2012-2016, pertumbuhan realisasi

tertinggi adalah pada tahun 2014 yaitu sebesar 19,41 persen. Kemudian, terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2016 yang tumbuh 8,74 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan realisasi Dana Perimbangan yang hampir mencapai 82 persen dari anggaran sebesar Rp. 688 milyar menjadi Rp. 563 milyar.

Selanjutnya Tabel 3.3 secara umum menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Kota Lhokseumawe terhadap Pendapatan Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2012-2016 berfluktuasi cenderung meningkat. Hanya saja pada tahun 2016, sedikit mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena realisasi pos lain-lain pendapatan asli Kota Lhokseumawe tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk Dana Perimbangan cenderung mengalami berfluktuasi. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sementara untuk Lain-Lain Pendapatan yang Sah cenderung meningkat dengan sedikit penurunan pada tahun 2016. Penurunan ini disebabkan karena realisasi pos dana penyesuaian otonomi khusus yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.3**  
**Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan**  
**Terhadap Total Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016**

Jenis Penerimaan	Proporsi terhadap Total Pendapatan					Rata-Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	
Pendapatan Asli Kota	4.85%	5.63%	6.34%	6.77%	6.20%	5.96%
Dana Perimbangan	85.26%	85.63%	73.65%	73.09%	75.74%	78.67%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	9.90%	8.74%	20.01%	20.14%	18.06%	15.37%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

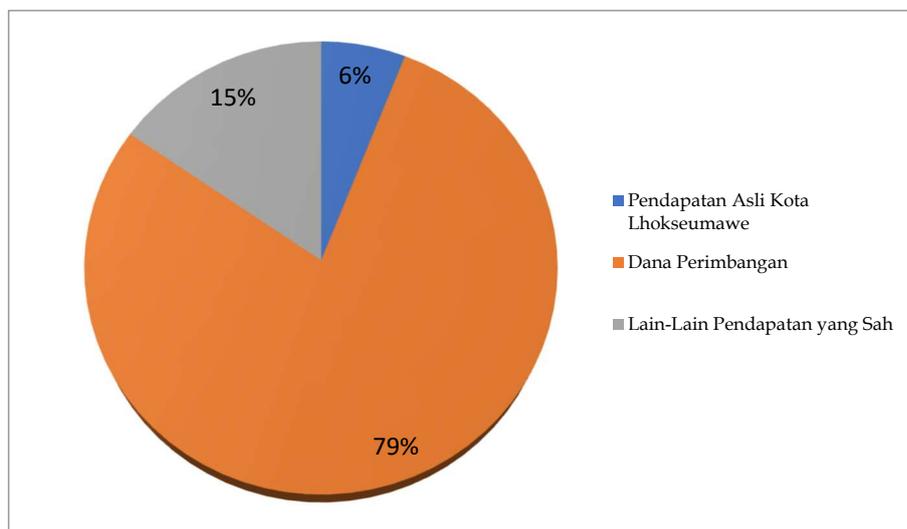
Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

Berdasarkan Gambar 3.3, dapat diketahui bahwa selama periode 2012-2016 Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan komponen Pendapatan Kota Lhokseumawe lainnya yaitu sebesar 78,67 persen.

Sebaliknya, kontribusi Pendapatan Asli Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu yang sama hanya menyumbang sebesar 5,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe masih sangat bergantung kepada Dana Perimbangan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa Kota Lhokseumawe masih belum baik dalam hal kemandirian fiskal. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan yang sah memberikan kontribusi 15,37 persen terhadap total pendapatan daerah.

Masih rendahnya penerimaan dari pendapatan asli Kota Lhokseumawe ini mencerminkan belum optimalnya perolehan pendapatan dari sumber-sumber potensi yang ada. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan perlu segera dicari sebuah formula yang dapat mendorong pertumbuhan penerimaan pendapatan asli Kota Lhokseumawe.

**Gambar 3.3**  
**Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan**  
**Terhadap Total Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016**



### 3.2.1. Pendapatan Asli Kota Lhokseumawe

Pendapatan Asli Kota Lhokseumawe merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan oleh daerah untuk melaksanakan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Rata-rata anggaran PAKL dari tahun 2012-2016 berjumlah sebesar Rp. 57 Milyar dengan realisasi sebesar Rp. 51 Milyar atau setara 88,03 persen. Selama periode 2012-2016, persentase realisasi PAKL cenderung tidak mencapai target yang telah ditetapkan (dibawah 100 persen). Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

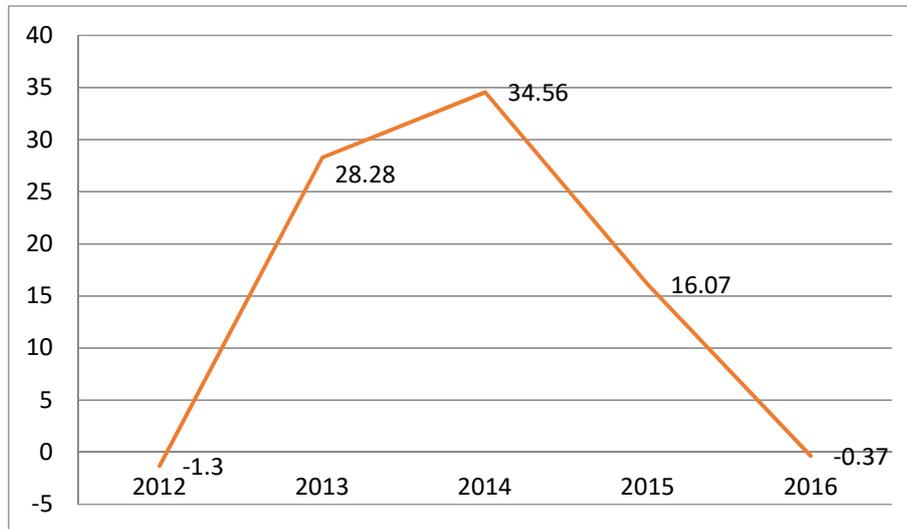
**Tabel 3.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016**

Tahun	Anggaran (Milyar Rp.)	Realisasi	
		Milyar Rp.	%
2012	35.10	28.23	80.43%
2013	38.35	36.21	94.43%
2014	49.31	48.73	98.83%
2015	67.31	56.56	84.02%
2016	66.75	56.35	84.41%
<b>Rata-Rata</b>	<b>51.37</b>	<b>45.22</b>	<b>88.03%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

Bila dilihat dari segi pertumbuhan, rata-rata PAKL selama periode 2012-2016 tumbuh sebesar 14,82 persen. Pertumbuhan PAKL tertinggi adalah pada tahun 2014 sebesar 34,56 persen. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi yang signifikan dari komponen PAKL yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Secara keseluruhan, realisasi pertumbuhan PAKL mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar 3.4**  
**Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Kota**  
**Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016**



### 3.2.2. Dana Perimbangan

Dalam penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya.

Selama tahun anggaran 2012-2016, rata-rata realisasi Dana Perimbangan cenderung mengalami fluktuasi. Hanya pada tahun 2012, 2013 dan 2014 realisasinya melebihi 100 persen. Selama periode 2012-2016, dari rata-rata anggaran sebesar Rp.632,39 Milyar terealisasi sebesar Rp.582.54 Milyar atau sebesar 92,12 persen. Lebih jelas disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.5**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016**

Tahun	Anggaran (Milyar Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Milyar Rp.	%	
2012	491.34	496.72	101.10%	16.16%
2013	546.23	550.94	100.86%	10.91%
2014	550.19	565.80	102.84%	2.70%
2015	646.14	610.88	94.54%	7.97%
2016	928.02	688.36	74.17%	12.68%
<b>Rata-Rata</b>	<b>632.39</b>	<b>582.54</b>	<b>92.12%</b>	<b>6.74%</b>

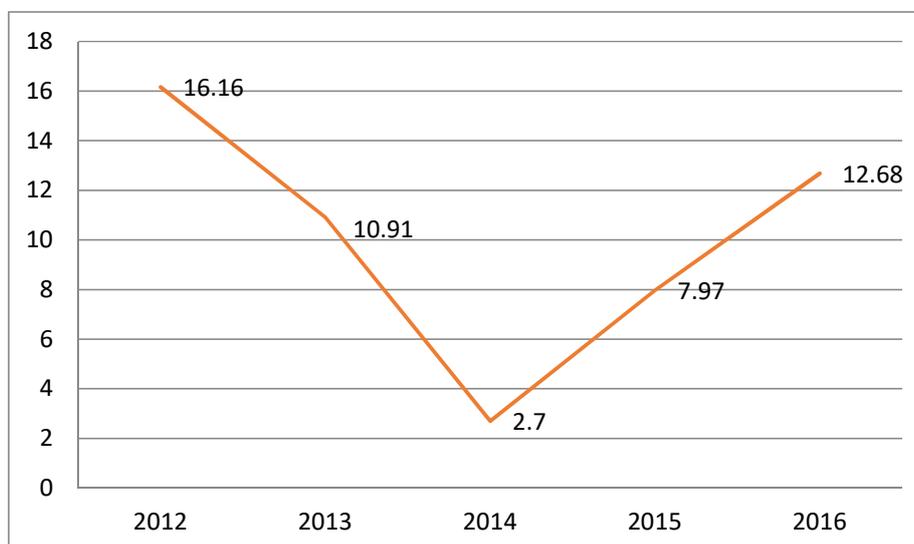
Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

Berdasarkan tabel di atas diketahui pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan tahun 2012 adalah sebesar 16,16 persen. Kemudian menurun pada tahun 2013 menjadi 10,91 persen. Penurunan disebabkan karena adanya penurunan realisasi dari Dana bagi hasil pajak/bukan pajak yang diterima Kota Lhokseumawe.

Pada tahun 2014, pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan tumbuh sebesar 2,70 persen, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 7,97 persen. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan dari Dana Alokasi Khusus dari realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp.33,75 Milyar menjadi Rp. 79,34 Milyar pada tahun 2015.

Sedangkan pada tahun 2016, meningkat lagi menjadi 12,68 persen. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan realisasi dari Dana Alokasi Khusus. Dana alokasi khusus pada tahun 2015 sebesar Rp.79,34 Milyar meningkat menjadi Rp.177,54 Milyar pada tahun 2016.

**Gambar 3.5**  
**Pertumbuhan Realisasi Dana Perimbangan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016**



### 3.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen pembentuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari Provinsi atau pemerintah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan pendapatan yang sah lainnya.

Rata-rata realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp.120,04 Milyar atau sebesar 75,16 persen dari rata-rata anggaran sebesar Rp.159,71 Milyar.

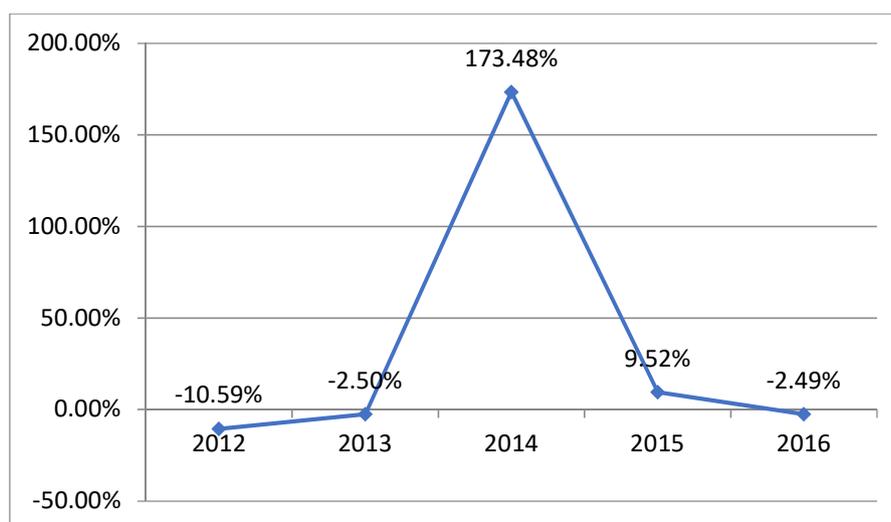
Dari segi pertumbuhannya, selama periode 2012-2016 rata-rata bertumbuh sebesar 23,28 persen. Dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 173,48 persen dan terendah pada tahun 2012 sebesar *minus* 10,59 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan realisasi pada tahun 2012 sebesar Rp.6,83 Milyar. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.6**  
**Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 (Milyar Rp.)**

Tahun	Anggaran (Milyar Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Milyar Rp.	%	
2012	84.70	57.66	68.07%	-10.59%
2013	80.60	56.22	69.75%	-2.50%
2014	196.35	153.74	78.30%	173.48%
2015	251.04	168.37	67.07%	9.52%
2016	185.87	164.18	88.33%	-2.49%
<b>Rata-Rata</b>	<b>159.71</b>	<b>120.04</b>	<b>75.16%</b>	<b>23.28%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

**Gambar 3.6**  
**Pertumbuhan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016**



### 3.3. Belanja Kota Lhokseumawe

Belanja Kota Lhokseumawe meliputi semua pengeluaran uang yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Kota Lhokseumawe dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kota Lhokseumawe. Belanja Kota Lhokseumawe terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- ✓ Belanja Tidak Langsung (BTL);
- ✓ Belanja langsung.

Rata-rata realisasi belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 mencapai 85,35 persen, dimana rata-rata realisasi dari BTL adalah sebesar 91,48 persen dan BL sebesar 80,54 persen. Pada pos BTL, rata-rata realisasi tertinggi terdapat pada Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang mencapai 94,55 persen, dan terendah pada Belanja Bantuan Sosial sebesar 86,15 persen. Sementara pada pos BL, realisasi tertinggi terdapat pada Belanja Pegawai yang mencapai sebesar 93,04 persen dan yang terendah adalah Belanja Modal sebesar 77,62 persen. Untuk lebih jelas realisasi belanja Kota Lhokseumawe selama periode 2012-2016 dapat dilihat pada berikut.

**Tabel 3.7**  
**Persentase Realisasi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016**

No	Uraian	Tahun (%)					Rata-Rata (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
<b>1</b>	<b>Belanja</b>	<b>92.81</b>	<b>93.32</b>	<b>86.54</b>	<b>82.65</b>	<b>71.43</b>	<b>85.35</b>
<b>1.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>93.92</b>	<b>94.04</b>	<b>87.06</b>	<b>92.32</b>	<b>90.09</b>	<b>91.48</b>
1.1.1	Belanja Pegawai	94.96	95.61	84.54	92.42	93.98	92.30
1.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Belanja Hibah	89.95	78.12	95.85	86.28	91.77	88.40
1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	88.49	91.30	90.77	95.14	65.04	86.15
1.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-
1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	97.97	97.93	99.54	91.25	86.07	94.55
1.1.8	Belanja Tidak Terduga	83.33	47.45	99.93	35.12	70.77	67.32
<b>1.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>91.19</b>	<b>92.22</b>	<b>85.90</b>	<b>75.69</b>	<b>57.69</b>	<b>80.54</b>
1.2.1	Belanja Pegawai	96.04	95.11	95.19	93.77	85.08	93.04
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.19	89.28	86.18	83.95	52.94	81.11
1.2.3	Belanja Modal	88.21	93.50	83.22	66.91	56.27	77.62

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

### 3.3.1. Belanja Tidak Langsung

Dilihat total anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) selama periode tahun 2012-2016 adalah berjumlah Rp.2.216,85 Milyar dengan realisasi sebesar 91,26 persen atau sebesar Rp.2.023,11 Milyar. Menurut jenis belanja BTL proporsi realisasi tertinggi berasal dari Belanja Pegawai yang menyumbang sebesar 72,89 persen, sebaliknya kontribusi terendah bersumber dari belanja tidak terduga sebesar 0,17 persen. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3.8**  
**Total Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 (Milyar Rp)**

No.	Uraian	Total Anggaran (Milyar Rp.)	Total Realisasi		
			(Milyar Rp.)	%	% Total
1	Belanja Pegawai	1,600.46	1,474.73	92.14	72.89
2	Belanja Bunga	0.64	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	94.61	84.61	89.43	4.18
5	Belanja Bantuan Sosial	281.12	249.29	88.68	12.32
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	4.12	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	230.83	210.99	91.41	10.43
8	Belanja Tidak Terduga	5.09	3.50	68.82	0.17
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2,216.85</b>	<b>2,023.11</b>	<b>91.26</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

### 3.3.2. Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2012-2016 mencapai Rp.1.679,41 Milyar atau setara dengan 75,35 persen dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp.2.229,08 Milyar. Belanja modal merupakan komponen penyumbang terbesar dalam realisasi total belanja langsung yang mencapai 50,78 persen, jika dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang masing-masing hanya

menyumbang sebesar 14,02 persen dan 35,19 persen. Lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.9**  
**Total Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 (Milyar Rp)**

No.	Uraian	Total Anggaran (Milyar Rp.)	Total Realisasi		
			Milyar Rp.	%	% Total
1	Belanja Pegawai	254.63	235.49	92.48	14.02
2	Belanja Barang dan Jasa	771.47	591.04	76.61	35.19
3	Belanja Modal	1,202.97	852.88	70.90	50.78
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2,229.08</b>	<b>1,679.41</b>	<b>75.34</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

### 3.4. Pembiayaan Kota Lhokseumawe

Pembiayaan Kota Lhokseumawe meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kota Lhokseumawe terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- ✓ Penerimaan pembiayaan;
- ✓ Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Realisasi pembiayaan daerah selama periode tahun 2012-2016 sangat berfluktuatif dengan rata-rata realisasi mencapai 53,39 persen atau sebesar Rp.16,99 Milyar dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.45,72 Milyar.

Secara keseluruhan realisasi pembiayaan daerah selama periode tahun 2012-2016 cenderung mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pembiayaan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 (Milyar Rupiah)**

No.	Tahun	Anggaran (Milyar Rp.)	Total Realisasi	
			Milyar Rp.	%
1	2012	5.85	5.55	94.87
2	2013	13.14	11.13	84.65
3	2014	44.75	12.55	28.05
4	2015	99.14	49.49	49.92
5	2016	65.73	6.23	9.48
<b>Rata-rata</b>		<b>45.72</b>	<b>16.99</b>	<b>53.39</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

Berdasarkan komponen pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe, rata-rata realisasi pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe yang bersumber dari penerimaan pembiayaan selama periode tahun 2012-2016 mencapai Rp.21,67 Milyar atau sebesar 57,48 persen dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp.50,70 Milyar. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2012-2016 cenderung mengalami penurunan. Lebih rinci dapat dilihat pada berikut.

**Tabel 3.11**  
**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 (Milyar Rupiah)**

No.	Tahun	Total Anggaran (Milyar Rp)	Total Realisasi	
			Milyar Rp.	%
1	2012	10.85	10.55	97.24
2	2013	18.14	16.13	88.88
3	2014	54.15	21.95	40.54
4	2015	104.14	53.49	51.36
5	2016	66.23	6.23	9.41
<b>Rata-Rata</b>		<b>50.70</b>	<b>21.67</b>	<b>57.48</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

Selanjutnya, rata-rata realisasi pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan selama periode tahun 2012-2016 adalah sebesar 76,00 persen. Realisasi pengeluaran pembiayaan selama tiga tahun berturut-turut 2012-2014 mencapai 100%, tahun 2015 hanya mencapai 80,00 persen, sedangkan tahun 2016 tidak terealisasi yang disebabkan oleh terjadinya defisit keuangan Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.12**  
**Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 (Milyar Rupiah)**

No.	Tahun	Total Anggaran (Milyar Rp)	Total Realisasi	
			Milyar Rp.	%
1	2012	5.00	5.00	100.00
2	2013	5.00	5.00	100.00
3	2014	9.40	9.40	100.00
4	2015	5.00	4.00	80.00
5	2016	0.50	-	-
	<b>Rata-Rata</b>	<b>4.98</b>	<b>4.68</b>	<b>76.00</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

### 3.5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe

Kebijakan pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Secara garis besar, kebijakan pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe tercermin pada komponen anggaran itu sendiri yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi

pendapatan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja daerah serta ketepatan penggunaan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah terutama dari sektor pendapatan asli daerah seperti kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan agar memperoleh hasil yang optimal, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah, serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru.

Selanjutnya, kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe diarahkan pada kebutuhan obyektif, efektif, dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe. Sementara untuk kebijakan pembiayaan dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Hal ini merupakan upaya preventif dalam mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Anggaran merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai semua program dan kegiatan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah harus merencanakan, melaksanakan, mengendalikan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan rencana keuangan pemerintah daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diharapkan melalui pengelolaan APBD yang baik dapat menggapai cita-cita dan tujuan pembangunan daerah itu sendiri.

Salah satu kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Defisit anggaran merupakan sekian dari permasalahan yang timbul dalam pengelolaan

keuangan itu sendiri. Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding dengan pendapatan daerah yang diperoleh.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pembiayaan di masa depan dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan kota.

Sesuai dengan kapasitas riil kemampuan keuangan yang tersedia dipergunakan untuk membiayai Rencana Pengeluaran Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. Pengalokasian dana pada Prioritas III akan dipenuhi, setelah pemenuhan dana pada Prioritas I dan Prioritas II terlebih dahulu. Adapun rencana pengeluaran terhadap masing-masing prioritas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Prioritas I, yaitu berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung, seperti belanja pegawai, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.
- b. Prioritas II, yaitu berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Program pembangunan daerah yang menjadi unggulan Kepala Daerah,

sebagaimana diamanatkan dalam RPJMK dan amanat/kebijakan nasional yang definitif, termasuk untuk prioritas pendidikan dua puluh persen dan kesehatan sepuluh persen. Prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang/jasa.

- c. Prioritas III, yaitu berkaitan dengan program prioritas di tingkat Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang merupakan penjabaran dari masing-masing urusan/bidang urusan yang berdampak luas pada masing-masing kelompok masyarakat yang dilayani. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan layanan dasar serta tugas pokok dan fungsi SKPK, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan administrasi perkantoran serta program pendukung lainnya untuk peningkatan pelayanan SKPK.

## BAB - IV

# ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

### 4.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Pinjaman.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) antara pusat dengan daerah dalam pelaksanaan

otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pola Hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial);
2. Pola Hubungan Konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;
3. Pola Partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat;
4. Pola Hubungan Delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Klasifikasi tingkat kemandirian keuangan daerah, pola hubungan pemerintah pusat dan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	> 25% - 50%	Konsultif
Sedang	> 50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	> 75% - 100%	Delegatif

Untuk menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah digunakan rumus :

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Dimana :

*RKKD adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*

*PAD adalah Pendapatan Asli Daerah*

*Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat*

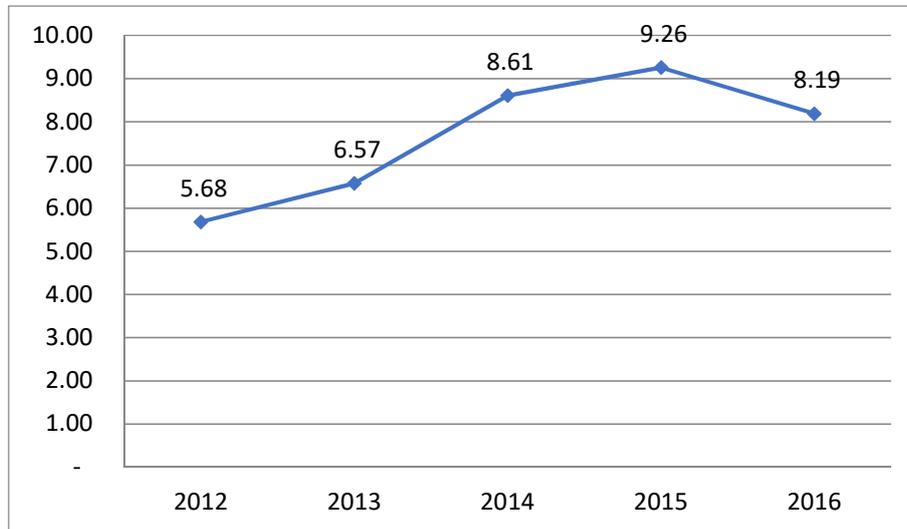
Berdasarkan rumus di atas dan data Anggaran dan Belanja Kota Lhokseumawe tahun 2012-2016 dapat diketahui rasio kemandirian. Pada tahun 2012 rasio kemandirian Kota Lhokseumawe sebesar 5,68% dengan kondisi realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.28,23 milyar dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp.496,72 milyar. Sedangkan pada tahun 2016 rasio kemandirian sebesar 8,19% dimana realisasi PAD sebesar Rp.56,35 milyar dan realisasi pendapatan tranfer sebesar Rp.688,36 milyar. Rasio tertinggi yaitu 9,26% diperoleh pada tahun 2015 dimana realisasi PAD sebesar 56,56 milyar dan realisasi pendapatan transfer sebesar 610,86 milyar.

**Tabel 4.2**  
**Rasio Kemandirian Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2012	28,230,886,878	496,724,974,727	5.68%	Instruktif
2013	36,213,933,082	550,942,083,884	6.57%	Instruktif
2014	48,730,219,320	565,796,575,395	8.61%	Instruktif
2015	56,560,454,282	610,875,498,509	9.26%	Instruktif
2016	56,348,631,473	688,355,157,426	8.19%	Instruktif

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

**Gambar 4.1**  
**Rasio Kemandirian Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016**



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2012-2015 Rasio Kemandirian Kota Lhokseumawe cenderung meningkat setiap tahunnya walaupun turun kembali pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan sumber-sumber pendanaan yang bisa meningkatkan kemandirian keuangan Kota Lhokseumawe. Dari di atas menunjukkan bahwa Rasio kemandirian Kota Lhokseumawe selama tahun 2012-2016 masih berada pada kategori kemampuan Rendah Sekali dengan kemampuan berada di bawah 25%. Dari rasio tersebut dapat diketahui bahwa pola hubungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan pemerintah pusat masih berpola instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Dengan ketergantungan daerah yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat dan penerimaan pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal, Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu

meningkatkan penerimaan sumber daya dan penerimaan dari perpajakan dan retribusi daerah. Selain itu pemerintah juga perlu mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar dapat menyokong Pendapatan Asli Daerah agar kedepannya bisa tumbuh menjadi daerah yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

#### 4.2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rumus perhitungan Rasio Efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektifitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektifitas seperti terlihat pada tabel.

**Tabel 4.3**  
**Skala Interval Efektivitas Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian (%)</b>
Sangat Efektif	> 100
Efektif	> 90 - 100
Cukup Efektif	> 80 - 90
Kurang Efektif	> 60 - 80
Tidak Efektif	≤ 60

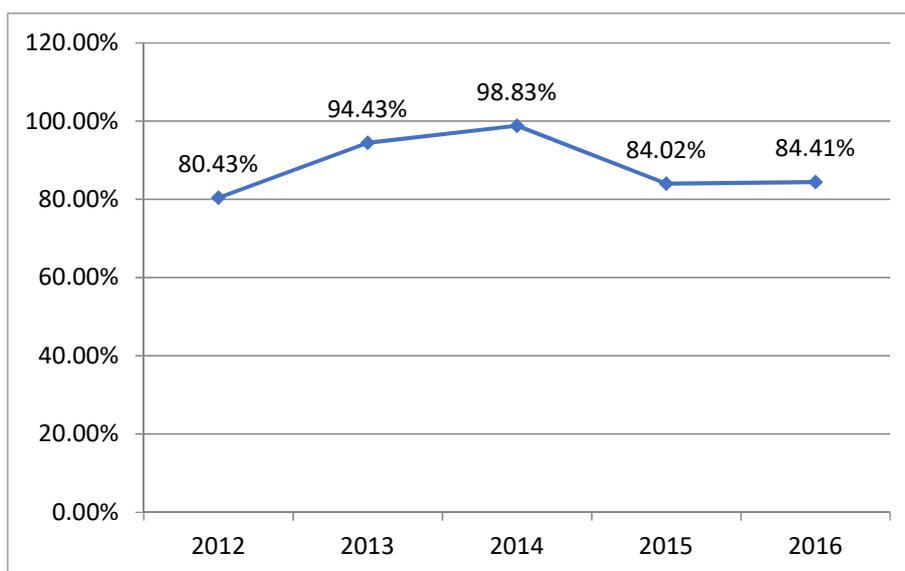
Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

**Tabel 4.4**  
**Rasio Efektivitas PAD Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016**

Tahun	Target PAD (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	Rasio Efektivitas
2012	35,100,405,000	28,230,886,878	80.43%
2013	38,350,390,000	36,213,933,082	94.43%
2014	49,305,773,500	48,730,219,320	98.83%
2015	67,314,758,015	56,560,454,282	84.02%
2016	66,754,367,843	56,348,631,473	84.41%
<b>Rata-Rata</b>	<b>51,365,138,872</b>	<b>45,216,825,007</b>	<b>88.03%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

**Gambar 4.2**  
**Rasio Efektivitas PAD Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016**



Dari data tabel dan gambar serta skala interval efektivitas keuangan daerah diatas, secara keseluruhan rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah selama periode 2012-2016 adalah dibawah 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Lhokseumawe berjalan Cukup Efektif.

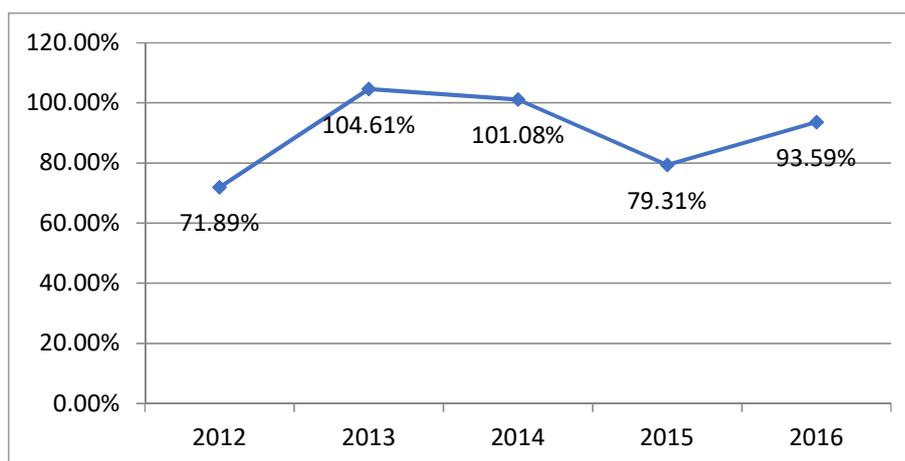
Selama periode tahun 2012-2016, hanya pada tahun 2013 dan 2014 anggaran pajak daerah yang terealisasi melebihi 100 persen. Selebihnya tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan, dimana dari rata-rata anggaran sebesar Rp.21.050.116.000,- terealisasi sebesar Rp.18.865.919.435,- atau setara dengan 89,62 persen. Hal ini disebabkan kurangnya kemampuan Kota Lhokseumawe untuk mengoptimalkan penerimaan dari sumber pendapatan pajak daerah. Selengkapnya pada tabel dan gambar berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016**

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio Efektivitas
2012	16,361,380,000	11,762,121,580	71.89%
2013	15,421,250,000	16,132,259,567	104.61%
2014	20,326,750,000	20,547,131,047	101.08%
2015	26,943,250,000	21,368,637,314	79.31%
2016	26,197,950,000	24,519,447,669	93.59%
<b>Rata-Rata</b>	<b>21,050,116,000</b>	<b>18,865,919,435</b>	<b>89.62%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

**Gambar 4.3**  
**Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016**



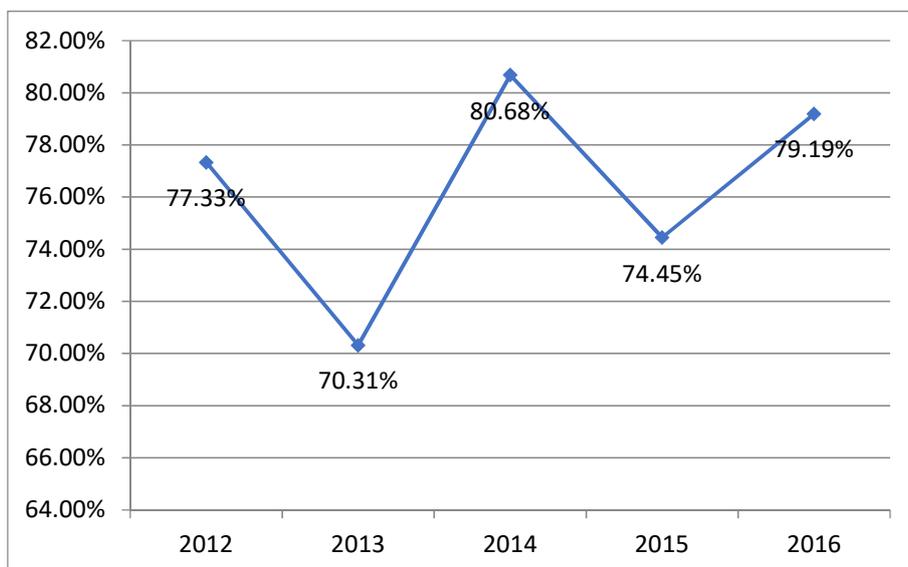
Selain pajak daerah, komponen pembentuk PAD adalah retribusi daerah. Realisasi retribusi daerah tahun 2012-2016 tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan, dimana dari rata-rata anggaran sebesar Rp.8.453.410.700,- terealisasi sebesar Rp.6.496.207.344,- atau setara dengan 76,85 persen. Lebih jelas disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

**Tabel 4.6**  
**Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016**

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio Efektivitas
2012	7,317,290,000	5,658,172,920	77.33%
2013	9,664,140,000	6,795,080,768	70.31%
2014	15,639,023,500	12,617,519,534	80.68%
2015	4,826,800,000	3,593,498,911	74.45%
2016	4,819,800,000	3,816,764,587	79.19%
<b>Rata-Rata</b>	<b>8,453,410,700</b>	<b>6,496,207,344</b>	<b>76.85%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

**Gambar 4.4**  
**Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016**



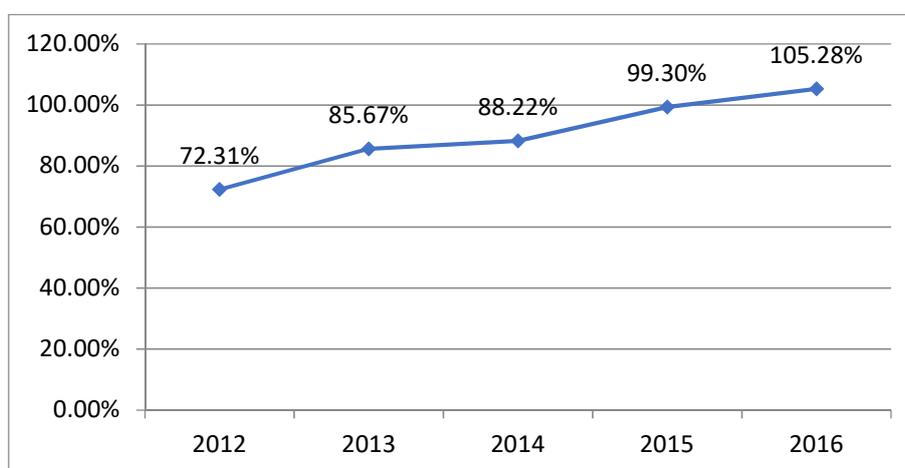
Selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Secara keseluruhan realisasinya cenderung meningkat. Pada tahun 2016 realisasi meningkat melebihi dari target yang telah ditetapkan (diatas 100%) yaitu sebesar 105,28 persen. Rata-rata realisasi anggaran sebesar Rp.3.047.597.181,- dari rata-rata target sebesar Rp.3.305.000.000,- atau setara dengan 92,21 persen. Rasio efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 4.7**  
**Rasio Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016**

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio Efektivitas
2012	2,540,000,000	1,836,563,817	72.31%
2013	2,865,000,000	2,454,417,855	85.67%
2014	3,040,000,000	2,681,787,314	88.22%
2015	4,040,000,000	4,011,810,914	99.30%
2016	4,040,000,000	4,253,406,003	105.28%
<b>Rata-Rata</b>	<b>3,305,000,000</b>	<b>3,047,597,181</b>	<b>92.21%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

**Gambar 4.5**  
**Rasio Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016**



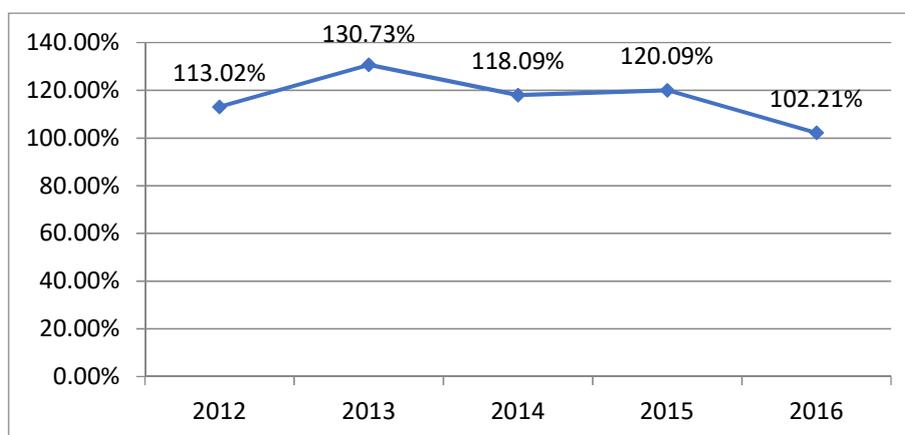
Komponen pembentuk PAD Kota Lhokseumawe selanjutnya adalah Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). ZIS merupakan salah satu instrument dalam pengentasan kemiskinan yang dalam pengelolaannya dikelola oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Selama periode 2012-2016 rata-rata realisasi ZIS melebihi dari target yang telah ditetapkan, dari rata-rata anggaran sebesar Rp.5.925.347.000,- terealisasi sebesar Rp.6.831.855.513,- atau setara dengan 115,30 persen. Secara keseluruhan tren anggaran dan realisasi ZIS cenderung meningkat. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.8**  
**Rasio Efektivitas Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016**

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio Efektivitas
2012	3,926,735,000	4,437,902,992	113.02%
2013	4,700,000,000	6,144,135,760	130.73%
2014	5,200,000,000	6,140,715,538	118.09%
2015	7,200,000,000	8,646,484,339	120.09%
2016	8,600,000,000	8,790,038,934	102.21%
<b>Rata-Rata</b>	<b>5,925,347,000</b>	<b>6,831,855,513</b>	<b>115.30%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

**Gambar 4.6**  
**Rasio Efektivitas Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016**



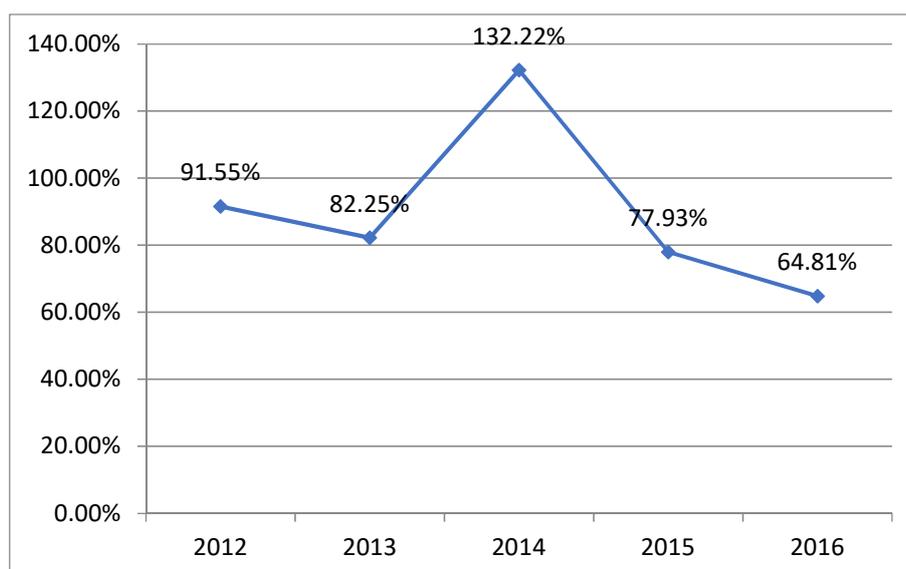
Lebih lanjut, komponen pembentuk PAD Kota Lhokseumawe adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Selama periode tahun 2012-2016 rata-rata realisasi lain-Lain PAD yang Sah tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dari rata-rata anggaran sebesar Rp.12.631.265.172,- terealisasi sebesar Rp.9.975.245.535,- atau sebesar 78,97 persen. Lebih dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.9**  
**Rasio Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016**

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio Efektivitas
2012	4,955,000,000	4,536,125,569	91.55%
2013	5,700,000,000	4,688,039,132	82.25%
2014	5,100,000,000	6,743,065,887	132.22%
2015	24,304,708,015	18,940,022,805	77.93%
2016	23,096,617,843	14,968,974,280	64.81%
<b>Rata-Rata</b>	<b>12,631,265,172</b>	<b>9,975,245,535</b>	<b>78.97%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

**Gambar 4.7**  
**Rasio Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016**



**Tabel 4.10**  
**Peta Efektivitas PAD Kota Lhokseumawe dan Komponennya**  
**Tahun 2012 s.d 2016**

No.	Uraian	Peta Efektivitas					
		2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1	Pendapatan Asli Daerah	Cukup Efektif	Efektif	Efektif	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Cukup Efektif
1.1	Pajak Daerah	Kurang Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Kurang Efektif	Efektif	Cukup Efektif
1.2	Retribusi Daerah	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Efektif
1.4	Zakat, Infaq, dan Shadaqah	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
1.5	Lain-Lain PAD yang Sah	Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif

Sumber : Data diolah, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2012-2016 rata-rata Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berada pada kategori Cukup Efektif. Capaian ini tentunya belum mencerminkan keberhasilan pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah. Masih diperlukan usaha-usaha yang lebih optimal dalam mencapai realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Rasio Efektivitas dari masing-masing komponen PAD, dapat dilihat bahwa rata-rata Rasio Efektivitas Pajak Daerah selama periode 2012-2016 berada dalam kategori Cukup Efektif. Perlu peningkatan usaha-usaha pencapaian pajak daerah dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan Rasio Efektivitas Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah berada dalam kategori Kurang Efektif. Capaian ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan. Masih diperlukan usaha-usaha pencapaian target yang ditetapkan setiap tahunnya. Kemudian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan berada dalam kategori Efektif. Hanya komponen Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang berada dalam kategori Sangat Efektif. Tentunya capaian ini perlu terus dipertahankan pada masa-masa yang akan datang.

#### 4.3. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi Persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti Persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio aktifitas itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBK}} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBK}} \times 100$$

*Keterangan :*

- *Belanja Rutin adalah Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa;*
- *Belanja Pembangunan adalah Belanja Modal, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga.*

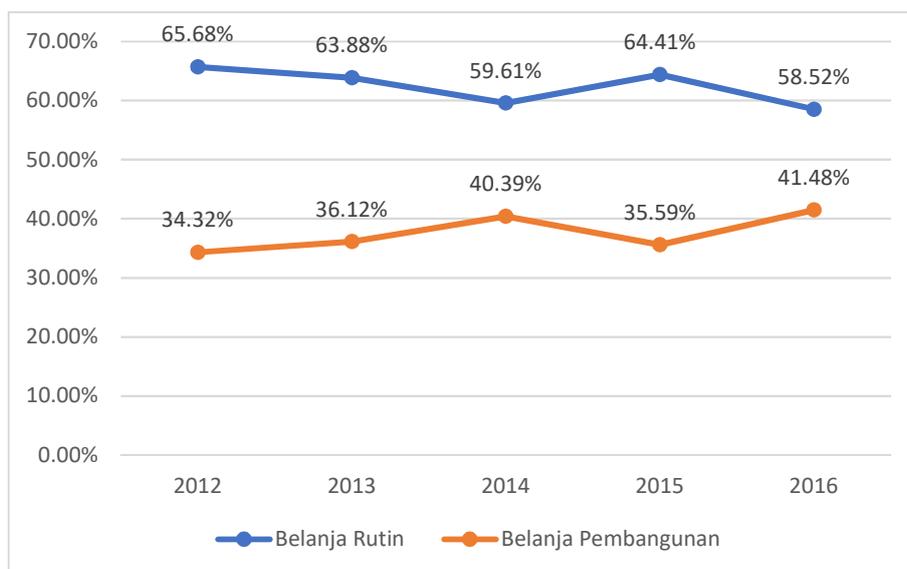
Untuk mengetahui Rasio Aktivitas Keuangan Kota Lhokseumawe selama periode 2012-2016 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 4.11**  
**Rasio Aktivitas Keuangan Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016**

No.	Tahun	Belanja Daerah (Milyar Rp.)	Belanja Rutin (Milyar Rp.)	Belanja Pembangunan (Milyar Rp.)	Rasio Aktivitas Belanja	
					Rutin	Pembangunan
1	2012	572.64	376.09	196.55	65.68%	34.32%
2	2013	633.00	404.34	228.66	63.88%	36.12%
3	2014	727.48	433.63	293.85	59.61%	40.39%
4	2015	879.07	566.20	312.87	64.41%	35.59%
5	2016	890.34	521.00	369.34	58.52%	41.48%
<b>Rata-Rata</b>		<b>740.51</b>	<b>460.25</b>	<b>280.25</b>	<b>62.15%</b>	<b>37.85%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 (Audited). BPKD (diolah) 2017.

**Gambar 4.8**  
**Rasio Aktivitas Keuangan Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2012 s.d 2016**



Dari tabel dan gambar di atas dapat dilihat bahwa, Rasio Aktivitas Keuangan Kota Lhokseumawe setiap tahunnya sangat fluktuatif. Pada tahun 2012 Rasio Belanja Rutin mencapai 65.68 persen dan Rasio Belanja Pembangunan hanya sebesar 34.32 persen. Besarnya Rasio Belanja Rutin

tersebut sangat dipengaruhi oleh besarnya Belanja Pegawai baik pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Pemerintah Kota Lhokseumawe setiap tahunnya terus melakukan penyeimbangan terhadap proporsi belanja rutin dan belanja pembangunan. Hingga pada akhir tahun 2016 Rasio Belanja Kota Lhokseumawe hampir proporsional, dimana Rasio Belanja Pembangunan Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan hingga mencapai 41.48 persen dan Belanja Rutin sebesar 58.52 persen.

## BAB - V

### PENUTUP

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Pinjaman.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Dari data Anggaran dan Belanja Kota Lhokseumawe tahun 2012-2016 diketahui bahwa Rasio kemandirian Kota Lhokseumawe masih berada pada kategori kemampuan Rendah Sekali dengan kemampuan berada di bawah 25%. Dari rasio tersebut dapat diketahui bahwa pola hubungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan pemerintah pusat masih berpola instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Dengan ketergantungan daerah yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat dan penerimaan pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal, Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu

meningkatkan penerimaan sumber daya dan penerimaan dari perpajakan dan retribusi daerah. Selain itu pemerintah juga perlu mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar dapat menyokong Pendapatan Asli Daerah agar kedepannya bisa tumbuh menjadi daerah yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Secara keseluruhan rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Lhokseumawe selama periode 2012-2016 masih dibawah 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Lhokseumawe berjalan Cukup Efektif.

Selama periode tahun 2012-2016, rata-rata anggaran sebesar Rp.21.050.116.000,- terealisasi sebesar Rp.18.865.919.435,-. atau setara dengan 89,62 persen. Hal ini disebabkan kurangnya kemampuan Kota Lhokseumawe untuk mengoptimalkan penerimaan dari sumber pendapatan pajak daerah.

Realisasi retribusi daerah tahun 2012-2016 tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan, dimana dari rata-rata anggaran sebesar Rp.8.453.410.700,- terealisasi sebesar Rp.6.496.207.344,-. atau setara dengan 76,85 persen.

Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, secara keseluruhan realisasinya cenderung meningkat. Pada tahun 2016 realisasi

meningkat melebihi dari target yang telah ditetapkan (diatas 100%) yaitu sebesar 105,28 persen. Rata-rata realisasi anggaran sebesar Rp.3.047.597.181,- dari rata-rata target sebesar Rp.3.305.000.000,- atau setara dengan 92,21 persen.

Komponen PAD dari Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) selama periode 2012-2016, rata-rata realisasi ZIS melebihi dari target yang telah ditetapkan, dari rata-rata anggaran sebesar Rp.5.925.347.000,- terealisasi sebesar Rp.6.831.855.513,- atau setara dengan 115,30 persen. Secara keseluruhan tren anggaran dan realisasi ZIS cenderung meningkat.

Selama periode tahun 2012-2016 rata-rata realisasi lain-Lain PAD yang Sah tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dari rata-rata anggaran sebesar Rp.12.631.265.172,- terealisasi sebesar Rp.9.975.245.535,- atau sebesar 78,97 persen.

Selama periode 2012-2016 rata-rata Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berada pada kategori Cukup Efektif. Capaian ini tentunya belum mencerminkan keberhasilan pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah. Masih diperlukan usaha-usaha yang lebih optimal dalam mencapai realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Rasio Efektivitas dari masing-masing komponen PAD, dapat dilihat bahwa rata-rata Rasio Efektivitas Pajak Daerah selama periode 2012-2016 berada dalam kategori Cukup Efektif. Perlu peningkatan usaha-usaha pencapaian pajak daerah dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan Rasio Efektivitas Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah berada dalam kategori Kurang Efektif. Capaian ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan. Masih diperlukan usaha-usaha pencapaian target yang ditetapkan setiap tahunnya. Kemudian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berada dalam kategori Efektif. Hanya komponen Zakat,

Infaq, dan Shadaqah yang berada dalam kategori Sangat Efektif. Tentunya capaian ini perlu terus dipertahankan pada masa-masa yang akan datang.

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti Persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio Aktivitas Keuangan Kota Lhokseumawe setiap tahunnya sangat fluktuatif. Pada tahun 2012 Rasio Belanja Rutin mencapai 65.68 persen dan Rasio Belanja Pembangunan hanya sebesar 34.32 persen. Besarnya Rasio Belanja Rutin tersebut sangat dipengaruhi oleh besarnya Belanja Pegawai baik pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Pemerintah Kota Lhokseumawe setiap tahunnya terus melakukan penyeimbangan terhadap proporsi belanja rutin dan belanja pembangunan. Hingga pada akhir tahun 2016 Rasio Belanja Kota Lhokseumawe hampir proporsional, dimana Rasio Belanja Pembangunan Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan hingga mencapai 41.48 persen dan Belanja Rutin sebesar 58.52 persen.

